
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN I

2019

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan I-2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan profil industri perbankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, kebijakan pengembangan dan hasil pengawasan perbankan secara khusus maupun secara terintegrasi selama triwulan I-2019. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan serta koordinasi terkait implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang menilai kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Di tengah berlanjutnya perang dagang dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, perekonomian domestik masih tumbuh baik ditopang oleh konsumsi utamanya konsumsi Pemerintah. Selain itu, defisit neraca perdagangan mulai berkurang ditopang oleh surplus neraca non migas. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh akselerasi pertumbuhan kredit disertai pertumbuhan DPK yang mulai meningkat. Hal tersebut membuat kondisi likuiditas perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi penarikan nasabah. Disamping itu, ketahanan perbankan masih terjaga ditopang permodalan yang memadai dan meningkatnya laba. Profil risiko perbankan juga masih terjaga sejalan dengan mulai meredanya risiko pasar akibat *capital inflow* ke pasar keuangan domestik. Untuk mempertahankan kondisi ketahanan perbankan yang baik, OJK akan memitigasi risiko yang timbul karena faktor global dan memfokuskan upaya agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2019



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel.....	7
Daftar Grafik	9
Ringkasan Eksekutif.....	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional.....	17
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik.....	17
B. Kinerja Perbankan	20
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	20
1.1 Aset BUK.....	21
1.2 Sumber Dana BUK.....	21
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	23
1.4 Rentabilitas BUK	24
1.5 Permodalan BUK.....	25
2. Kinerja Bank Syariah	27
2.1 Aset Bank Syariah.....	27
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	28
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah	28
2.4 Rentabilitas BUS.....	29
2.5 Permodalan BUS.....	29
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	30
3.1 Aset BPR.....	30
3.2 Sumber Dana BPR.....	31
3.3 Penggunaan Dana BPR	32
3.4 Rentabilitas BPR.....	33
3.5 Permodalan BPR.....	33
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	34
4.1 Aset BPRS	34
4.2 Sumber Dana BPRS.....	35
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	35
4.4 Rentabilitas BPRS.....	36
4.5 Permodalan BPRS.....	36
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	37
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR.....	39
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	41
Bab II Profil Risiko Perbankan	45
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	45
2. Risiko Kredit	45
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	46
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	48
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	49

3. Risiko Pasar	50
3.1 Risiko Nilai Tukar	50
3.2 Risiko Suku Bunga	51
4. Risiko Likuiditas	52
5. Tata Kelola Perbankan	54
Bab III Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional	59
1. Pengaturan Perbankan	59
1.1 Bank Umum	59
1.2 BPR	59
2. Pengembangan Pengawasan Perbankan	59
2.1 Bank Umum	59
2.2 BPR	60
2.3 Perbankan Syariah	60
Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan	63
1. Penegakan Kepatuhan Perbankan	63
1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)	63
1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi	64
1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT	64
2. Kelembagaan Perbankan	65
2.1 Bank Umum	66
2.1.1 Perizinan	66
2.1.2 Jaringan Kantor	66
2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT <i>New Entry</i>)	67
2.2 Bank Syariah	68
2.2.1 Perizinan	68
2.2.2 Jaringan Kantor	68
2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT <i>New Entry</i>)	69
2.3 BPR	69
2.3.1 Perizinan	69
2.3.2 Jaringan Kantor	70
2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT <i>New Entry</i>)	70
Bab V Koordinasi Antar Lembaga	73
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan	73
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)	73
1.2 Bank Indonesia (BI)	74
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	75
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT	76
2.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	76
2.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya	77
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional	81
<i>Mutual Evaluation Review (MER)</i>	81
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan	84
A. Perlindungan Konsumen	84
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen	84

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan	87
1.1.1 Layanan Pertanyaan.....	87
1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi	88
1.1.3 Layanan Pengaduan.....	88
1.2 Data Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).....	89
2. Kegiatan Komunikasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.....	89
3. <i>Thematic Surveillance</i> dan Operasi Intelijen Pasar	90
4. Pemantauan Iklan Triwulanan.....	91
5. Peluncuran Pedoman Iklan Jasa Keuangan	91
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	92
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	92
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	93
3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA).....	93
4. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).....	94
5. Edukasi Keuangan.....	94
6. <i>Training of Trainers</i> (ToT) kepada Guru SMP dan SMA.....	94
7. <i>Workshop</i> SiPEDULI.....	95
Lampiran	99
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	99
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan I - 2019	101
Lampiran III. <i>Glossary</i>	105

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1	Indikator BUK.....	20
Tabel 2	Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	21
Tabel 3	Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	21
Tabel 4	DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	22
Tabel 5	Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	23
Tabel 6	Penggunaan Dana BUK.....	23
Tabel 7	Rasio Perbankan berdasarkan Kelompok Kepemilikan dan BUKU	25
Tabel 8	Komponen Permodalan BUK.....	26
Tabel 9	Indikator Umum Bank Syariah	27
Tabel 10	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	28
Tabel 11	Indikator Umum BPR	30
Tabel 12	Penyebaran DPK BPR.....	31
Tabel 13	Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi.....	32
Tabel 14	Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	33
Tabel 15	Indikator Umum BPRS	34
Tabel 16	Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	36
Tabel 17	Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	37
Tabel 18	Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	39
Tabel 19	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	40
Tabel 20	NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	41
Tabel 21	Perkembangan ATMR.....	45
Tabel 22	Perkembangan Kualitas Kredit	46
Tabel 23	Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	47
Tabel 24	Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan	47
Tabel 25	Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	47
Tabel 26	NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi	50
Tabel 27	Perkembangan LCR Perbankan	53
Tabel 28	Rekapitulasi Transaksi PUAB	54
Tabel 29	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	63
Tabel 30	Jaringan Kantor Bank Umum.....	67
Tabel 31	PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum.....	68
Tabel 32	Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	69
Tabel 33	PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Syariah.....	69
Tabel 34	Jaringan Kantor BPR.....	70
Tabel 35	PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR	70
Tabel 36	Total Layanan Per Sektor	86
Tabel 37	Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan	87
Tabel 38	Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2019	92

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Harga Komoditas dan Minyak Dunia.....	18
Grafik 2	Pertumbuhan PDB Indonesia.....	18
Grafik 3	Ekspor Migas dan Non Migas.....	19
Grafik 4	Impor Migas dan Non Migas.....	19
Grafik 5	Neraca Perdagangan Indonesia.....	19
Grafik 6	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	21
Grafik 7	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK	22
Grafik 8	Tren Pangsa Komposisi DPK	22
Grafik 9	Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang	24
Grafik 10	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	24
Grafik 11	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah.....	27
Grafik 12	Pertumbuhan DPK Bank Syariah.....	28
Grafik 13	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	29
Grafik 14	Laba dan ROA BUS.....	29
Grafik 15	Perkembangan Aset BPR	31
Grafik 16	Perkembangan DPK BPR.....	31
Grafik 17	Tren Aset BPRS	34
Grafik 18	Tren Pertumbuhan DPK BPRS.....	35
Grafik 19	Tren ROA dan BOPO BPRS.....	36
Grafik 20	Pertumbuhan Tahunan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	37
Grafik 21	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah	40
Grafik 22	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	41
Grafik 23	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit.....	46
Grafik 24	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	46
Grafik 25	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	48
Grafik 26	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi.....	49
Grafik 27	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi	49
Grafik 28	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial)	50
Grafik 29	Tren CDS dan NDF Indonesia	50
Grafik 30	<i>Net Buy (Sell)</i> Transaksi Saham dan SBN Indonesia.....	51
Grafik 31	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	51
Grafik 32	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN.....	51
Grafik 33	Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga.....	52
Grafik 34	<i>Gap</i> Suku Bunga Kredit dan Deposito.....	52
Grafik 35	Perkembangan Parameter IRRBB	52
Grafik 36	LDR berdasarkan Valuta.....	53
Grafik 37	AL/NCD dan AL/DPK	53
Grafik 38	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	54
Grafik 39	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	55
Grafik 40	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	66
Grafik 41	Penyebaran Jaringan Kantor BUS	69
Grafik 42	Jaringan Kantor BPR	70

Grafik 43	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan	86
Grafik 44	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	87
Grafik 45	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	88
Grafik 46	Media Penerimaan Layanan SLIK Triwulan I-2019	89
Grafik 47	Wilayah Penyebaran Nasabah Laku Pandai	93
Grafik 48	Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai	93

Ringkasan Eksekutif

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, perekonomian domestik mampu tumbuh 5,07% lebih baik dari tahun sebelumnya ditopang oleh konsumsi. Kenaikan konsumsi domestik utamanya didorong oleh stimulus fiskal dalam bentuk bantuan sosial, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta peningkatan pengeluaran dalam rangka Pemilu 2019. Sementara itu, investasi non bangunan dan ekspor tumbuh melambat sebagai pengaruh perlambatan volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas.

Dari sisi perbankan, konsumsi domestik yang tumbuh cukup baik mendorong pertumbuhan kredit bank umum sebesar 11,55% (yoy). Sementara itu, DPK masih tumbuh melambat meski sudah lebih baik dari triwulan sebelumnya. Hal tersebut membuat kondisi likuiditas perbankan sedikit lebih longgar dibandingkan triwulan sebelumnya. Arah kebijakan moneter AS yang mulai tampak *dovish* mendorong masuknya modal asing ke pasar keuangan domestik sehingga membuat risiko pasar sedikit mereda dengan dibarengi penurunan *yield* yang berdampak pada potensi kenaikan nilai wajar portofolio surat-surat berharga perbankan. Secara keseluruhan, ketahanan perbankan cukup baik ditopang tingkat permodalan yang tinggi serta profil risiko perbankan yang terjaga.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK selalu meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Terkait peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait penguatan kelembagaan bank serta menginisiasi peluncuran aplikasi OJK-BOX untuk meningkatkan pengawasan perbankan. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel), Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (Jaring). Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait juga terus ditingkatkan antara lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara bilateral maupun dalam wadah KSSK serta dalam memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor jasa keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFO GRAFIS

MARET 2019

OVERVIEW MAKROEKONOMI



Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 diproyeksi tumbuh melambat sejalan dengan eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok.

- ✔ Ekonomi AS tumbuh 3,2% (yoy) ditopang kenaikan konsumsi dan penurunan impor.
 - ✔ Ekonomi Eropa dan Jepang melambat karena perlambatan konsumsi dan turunnya produksi akibat naiknya *aging population*.
 - ✔ Ekonomi Tiongkok melambat namun masih lebih baik dari perkiraan konsensus karena ditopang oleh stimulus fiskal.
- ⚠ Risiko**

 - Melambatnya pertumbuhan ekonomi global
 - Penurunan harga komoditas dunia
 - Faktor geopolitik global



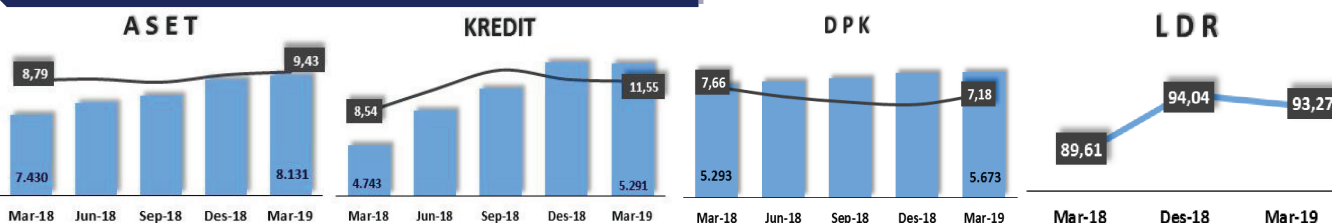
Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik tumbuh 5,07%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (5,06%) utamanya didorong oleh konsumsi pemerintah.

- ✔ Konsumsi rumah tangga membaik ditopang peningkatan pendapatan dan program Bansos Pemerintah.
 - ✔ Investasi melambat.
 - ✔ Konsumsi Pemerintah meningkat sejalan naiknya stimulus fiskal (Bansos) dan menjelang Pemilu 2019.
 - ✔ Neraca perdagangan masih defisit.
- ⚠ Risiko**

 - Fluktuasi nilai tukar
 - Perlambatan ekonomi global
 - Fluktuasi harga komoditas ekspor Indonesia
 - Defisit neraca perdagangan dan CAD

KINERJA BANK UMUM



Intermediasi berjalan baik didukung akselerasi kredit di tengah melambatnya pertumbuhan DPK.

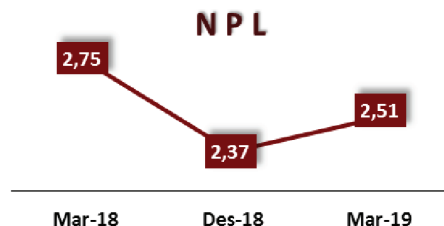
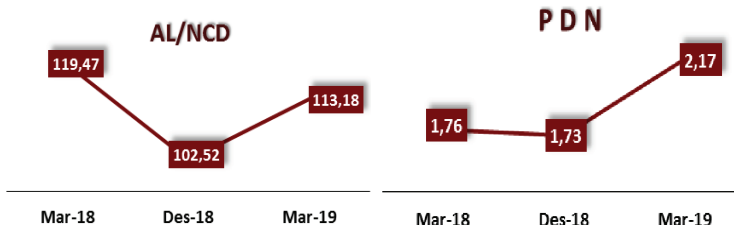
PROFIL RISIKO



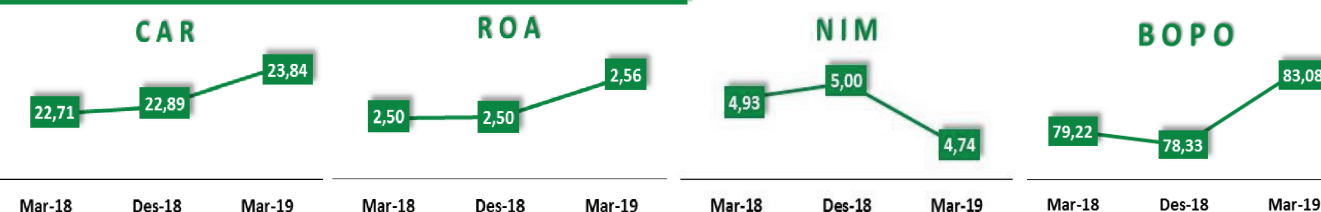
Periode	ATMR (yoy)		
	Mar '18	Des '18	Mar '19
	9,62%	9,88%	9,02%

Periode	ATMR Kredit	ATMR Operasional	ATMR Pasar
	Mar '18	8,79%	9,86%
Des '18	10,06%	9,75%	1,56%
Mar '19	9,51%	7,49%	9,62%

Profil risiko perbankan manageable, dengan risiko pasar yang menurun.



PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM



Rentabilitas meningkat di dukung kenaikan laba, sehingga turut menopang permodalan pada level tinggi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Perekonomian global diproyeksi tumbuh melambat sebagai dampak berlanjutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Meskipun demikian, ekonomi domestik masih tumbuh baik ditopang oleh konsumsi. Sejalan dengan ekonomi domestik yang cukup baik, ekspansi kredit perbankan masih berlanjut sehingga berdampak pada kenaikan profitabilitas bank.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Perekonomian global tahun 2019 diprediksi tumbuh melambat dibandingkan tahun 2018 sejalan dengan eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok yang berakibat pada menurunnya volume transaksi perdagangan dunia dan harga komoditas global. Kedua aspek tersebut berkorelasi pada proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia baik di negara *advanced economies* (AE) maupun *emerging economies* (EM).

Di luar ekpektasi, perekonomian AS pada triwulan I-2019 tumbuh 3,2% (yoy) lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan maupun tahun sebelumnya. Peningkatan ini ditopang oleh membaiknya konsumsi masyarakat AS sebagaimana tercermin pada *personal consumption expenditure* (PCE), naiknya pengeluaran pemerintah utamanya pada infrastruktur dan *national defense*, turunnya impor, serta naiknya persediaan barang manufaktur yang tercermin pada naiknya *industrial production index*. Selain itu, investasi pada *intellectual property product* meningkat meskipun secara umum investasi menunjukkan

perlambatan seiring dengan berakhirnya dampak stimulus fiskal *corporate tax cut*.

Penurunan impor berdampak pada berkurangnya defisit neraca perdagangan AS. Turunnya impor ini dipengaruhi oleh pelaksanaan *front-loading* oleh para importir pada tahun lalu untuk mengantisipasi kenaikan tarif sejalan dengan eskalasi perang dagang AS dengan Tiongkok. Pada triwulan mendatang, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan melambat yang ditandai dengan penurunan indeks keyakinan konsumen, melambatnya penjualan ritel dan ekspektasi perlambatan ekspor akibat penguatan nilai dollar AS.

Sementara itu, ekonomi kawasan Eropa tumbuh 1,2% (yoy) lebih lambat dari 2,4% (yoy) pada tahun sebelumnya. Penyebab utama adalah melambatnya konsumsi masyarakat dan *consumer confidence index*, turunnya produksi dan ekspor, serta permasalahan struktural karena meningkatnya penduduk usia lanjut (*aging population*). Di sisi lain, produksi Eropa melambat seperti terekam dari penurunan *Purchasing Manager Index* sektor manufaktur serta pelemahan permintaan

global seiring penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Searah dengan Eropa, ekonomi Jepang juga diperkirakan tumbuh melambat dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi serta aktivitas produksi yang terekam dari penurunan penjualan ritel serta penurunan *Tankan Large Manufacturing Index*¹. Penurunan index Tankan antara lain dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang sangat berdampak pada penurunan produksi dan ekspor produk manufaktur Jepang utamanya ekspor mesin-mesin kepada Tiongkok dan AS.

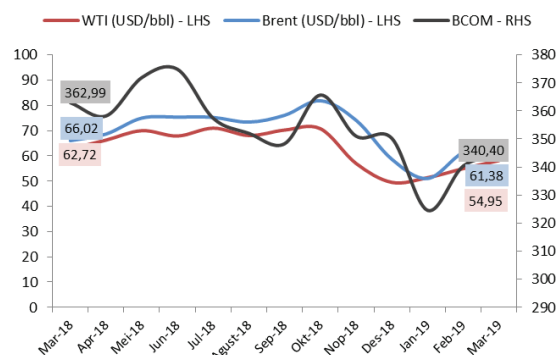
Ekonomi Tiongkok pada triwulan I-2019 tumbuh 6,4% (yoy), melambat dari 6,9% (yoy) pada tahun sebelumnya meskipun sedikit lebih tinggi dari perkiraan konsensus sebesar 6,3%. Perbaikan dari konsensus tersebut utamanya dipicu kebijakan stimulus fiskal Pemerintah Tiongkok untuk mendorong *output* industri dan konsumsi masyarakat, sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari perang dagang dengan AS.

Seiring dengan pelemahan permintaan global akibat perlambatan pertumbuhan baik AE maupun EM serta efek disrupsi perang dagang antara AS dan Tiongkok, volume perdagangan dunia ikut turun dan berdampak pada turunnya harga barang-barang komoditas. Penurunan harga barang komoditas tercermin pada turunnya indeks harga komoditas bloomberg dari tahun sebelumnya 362,99% menjadi 340,40%. Namun

¹ *The Tankan Large Manufacturing Index* merupakan proyeksi kondisi kegiatan usaha di sektor industri manufaktur Jepang. Indeks ini dihasilkan secara triwulanan dari survei Bank of Japan terhadap perusahaan manufaktur yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari JPY 20 juta.

demikian, pada triwulan I-2019, mulai ada sedikit perbaikan pada harga komoditas yang antara lain juga tercermin pada mulai naiknya harga minyak baik WTI maupun Brent. Membaiknya harga minyak tersebut seiring dengan mulai efektifnya pembatasan produksi oleh OPEC+ serta faktor geopolitik seperti krisis politik dan ekonomi di Venezuela dan krisis politik dan perang di Libya yang mempengaruhi penurunan *supply* minyak.

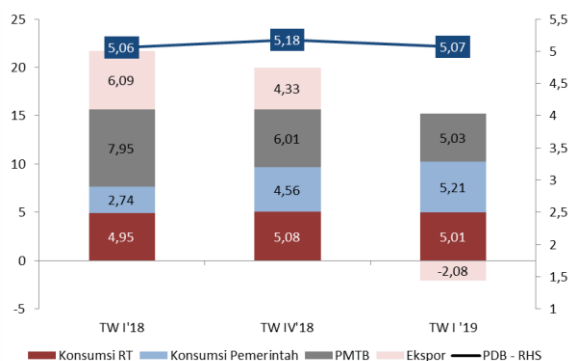
Grafik 1 Perkembangan Harga Komoditas dan Minyak Dunia



Sumber: Reuters

Di tengah tren perlambatan ekonomi dunia, ekonomi domestik masih tumbuh baik yaitu sebesar 5,07% (yoy) sedikit lebih tinggi dari 5,06% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan pada triwulan berjalan ditopang kuatnya konsumsi Pemerintah yang tumbuh 5,21% (yoy), atau jauh lebih tinggi dari 2,74% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik 2 Pertumbuhan PDB Indonesia



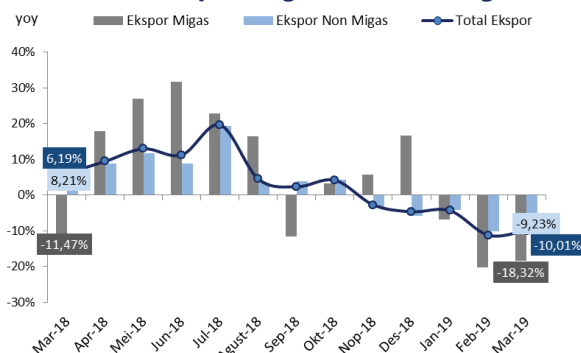
Sumber: BPS

Peningkatan konsumsi Pemerintah berasal dari stimulus/kenaikan fiskal untuk penyaluran bantuan sosial (PKH), transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), dan kenaikan pengeluaran dalam rangka pemilu serentak tahun 2019.

Sementara itu, investasi (PMTB) tumbuh melambat sejalan dengan penurunan realisasi belanja modal Pemerintah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

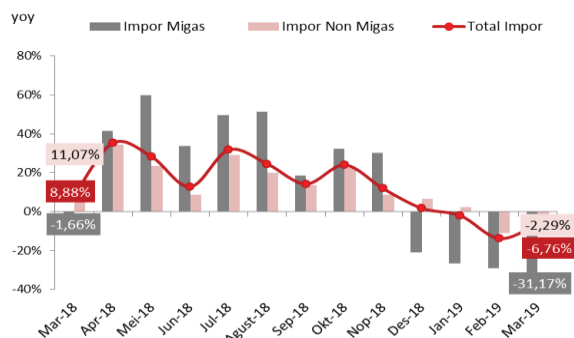
Di sisi lain, kinerja ekspor menurun baik pada transaksi migas maupun non-migas. Meskipun impor juga menurun, namun ekspor turun lebih dalam dibandingkan penurunan impor sehingga membuat neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar USD193 juta, jauh menurun dibandingkan perdagangan triwulan I-2018 yang mencatatkan surplus sebesar USD314 juta. Defisit tersebut dipengaruhi oleh transaksi migas pada triwulan berjalan yang masih defisit, meskipun neraca non-migas mengalami surplus.

Grafik 3 Ekspor Migas dan Non Migas



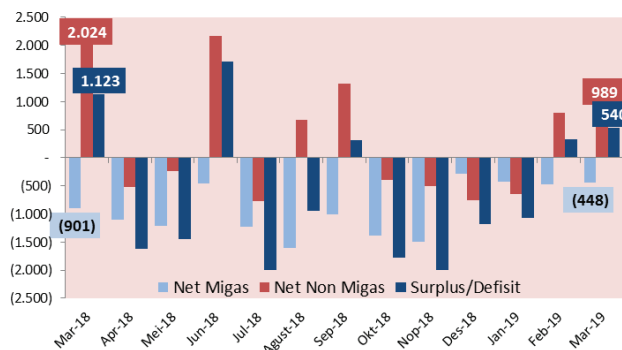
Sumber: BPS

Grafik 4 Impor Migas dan Non Migas



Sumber: BPS

Grafik 5 Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Sejalan dengan perekonomian domestik yang tumbuh cukup kuat, fungsi intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan ditandai akselerasi pertumbuhan kredit sebesar 11,55% (yoy) pada Maret 2019. Namun demikian, DPK tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 7,18% (yoy). Secara umum, ketahanan bank umum dalam menyerap risiko masih cukup solid dengan tingkat permodalan (CAR) tercatat sebesar 23,84% dengan risiko kredit yang membaik tercermin dari NPL yang menurun menjadi 2,51%.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK cukup baik dengan kredit tumbuh terakselerasi yaitu 11,69% (yoy) di tengah DPK yang tumbuh melambat sebesar 7,17% (yoy). Dengan terjadinya *funding gap* tersebut, kondisi likuiditas perbankan sedikit menegat dengan LDR mencapai 94,00%. Meskipun LDR melebihi *threshold* 92%, kondisi likuiditas perbankan secara umum masih terjaga, terefleksi dari rasio AL/NCD dan

AL/DPK yang masing-masing tercatat 100,35% dan 20,96%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Sejalan dengan hal tersebut, risiko kredit BUK secara gradual membaik dengan NPL *gross* dan NPL *net* masing-masing turun 20 bps (yoy) dan 8 bps (yoy) menjadi 2,47% dan 1,11%.

Tabel 1 Indikator BUK

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Mar '18	Des '18	Mar '19	Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Total Aset (Rp Milyar)	7.135.601	7.751.655	7.812.547	↑ 3,87%	↑ 0,79%	↑ 8,58%	↑ 9,49%
Kredit (Rp Milyar)	4.553.173	5.092.584	5.085.310	↑ 3,47%	↓ -0,14%	↑ 8,62%	↑ 11,69%
DPK (Rp Milyar)	5.048.278	5.372.841	5.410.178	↑ 2,71%	↑ 0,69%	↑ 7,33%	↑ 7,17%
- Giro (Rp Milyar)	1.207.182	1.287.480	1.281.672	↑ 0,31%	↓ -0,45%	↑ 7,41%	↑ 6,17%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.568.534	1.737.216	1.663.094	↑ 5,71%	↓ -4,27%	↑ 10,05%	↑ 6,03%
- Deposito (Rp Milyar)	2.272.562	2.348.146	2.465.412	↑ 1,91%	↑ 4,99%	↑ 5,49%	↑ 8,49%
CAR (%)	22,65	22,97	23,42	7	44	(23)	77
ROA (%)	2,55	2,55	2,60	5	5	5	5
NIM (%)	5,07	5,14	4,86	(0)	(28)	(32)	(20)
BOPO (%)	78,76	77,86	82,92	(127)	506	(139)	416
NPL Gross (%)	2,67	2,33	2,47	(28)	14	(30)	(20)
NPL Net (%)	1,20	1,00	1,11	(17)	11	(9)	(8)
LDR (%)	90,19	94,78	94,00	70	(79)	107	380

Sumber: SPI Maret 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 9,49% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,58% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan kredit perbankan yang masih tumbuh dua digit pada periode laporan. Berdasarkan kelompok bank, peningkatan aset utamanya terjadi pada kelompok BUMN, yang mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,04% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,83% (yoy). Pertumbuhan kredit pada kelompok bank ini salah satunya didorong oleh penyaluran kredit infrastruktur yang masih tinggi.

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 48,88% sedangkan aset 20 bank besar menguasai 80,83% dari total aset perbankan (Tabel 2).

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
2014	45,94	79,70
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
2018	49,65	79,93
Mar '19	48,88	80,83

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	Δ qtq		Δ yoy	
	Mar '18	Des '18	Mar '19		Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
BUMN	2.923.580	3.342.996	3.304.934	42,30%	6,79%	-1,14%	9,82%	13,04%
BUSN Devisa	3.126.703	3.270.606	3.320.033	42,50%	2,14%	1,51%	7,37%	6,18%
BUSN Non Devisa	58.608	66.698	68.100	0,87%	6,86%	2,10%	23,08%	16,20%
BPD	614.855	625.658	638.835	8,18%	0,93%	2,11%	8,84%	3,90%
KCBA	411.878	445.698	480.644	6,15%	-0,53%	7,84%	6,96%	16,70%
Total	7.135.623	7.751.655	7.812.547	100%	3,87%	0,79%	8,58%	9,49%

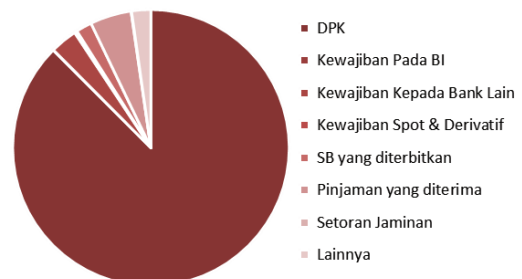
Sumber: SPI Maret 2019

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 87,50% dari dana perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 7,17% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,33% (yoy). Meskipun masih tercatat melambat, komponen deposito yang memiliki porsi terbesar DPK perbankan tumbuh meningkat 8,49% (yoy). Peningkatan deposito tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan DPK valas yang tumbuh tinggi seiring dengan meningkatnya suku bunga tertimbang simpanan valas.

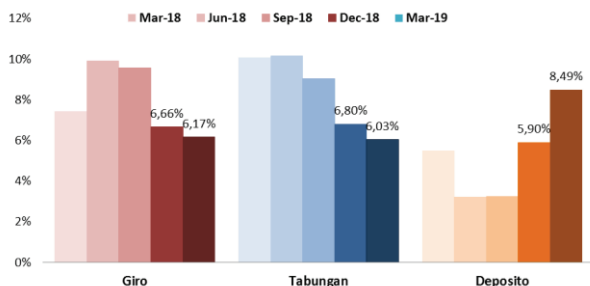
Sementara itu, giro dan tabungan masih tumbuh melambat masing-masing 6,17% (yoy) dan 6,03% (yoy).

Grafik 6 Komposisi Sumber Dana Perbankan



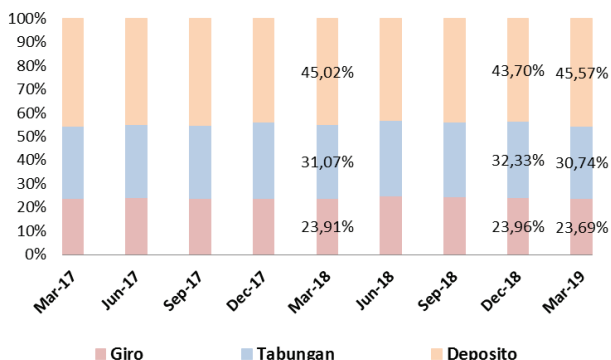
Sumber: SPI Maret 2019

Grafik 7 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI Maret 2019

Grafik 8 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Maret 2019

Melambatnya pertumbuhan DPK utamanya dipicu oleh rendahnya pertumbuhan tabungan nominal <Rp2M (25,43% dari total DPK BUK), yang hanya tumbuh sebesar 7,85% (yoy), di saat tahun sebelumnya tumbuh cukup tinggi 10,64% (yoy). Selain itu, giro nominal >Rp2M (19,97% dari total DPK BUK) juga melambat sebesar 6,10% setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 6,86% (yoy). Namun demikian, deposito nominal >Rp2M yang merupakan

komponen dengan porsi terbesar DPK BUK (32,87%) mulai meningkat sebesar 9,64% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,99% (yoy). Pertumbuhan deposito nominal >Rp2M tersebut mendorong pertumbuhan DPK BUK secara umum, meskipun masih melambat, namun memperkecil *gap* pertumbuhan DPK pada periode ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN (4 bank) sebesar 43,82%, diikuti BUSN Devisa (47 bank) sebesar 42,85%. Pertumbuhan kelompok bank BUMN mengalami peningkatan dari 9,54% (yoy) menjadi 11,99% (yoy). Di sisi lain, kelompok bank BUSN Devisa masih mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 4,91% (yoy) menjadi 3,68% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 77,80%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,86%) diikuti Jawa Timur (9,72%) dan Jawa Barat (8,03%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Mar '18	Des '18	Mar '19		Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
BUMN	2.116.814.549	2.412.452.879	2.370.648.739	43,82	5,95%	-1,73%	9,54%	11,99%
BUSD	2.236.105.668	2.281.928.923	2.318.464.046	42,85	1,78%	1,60%	4,91%	3,68%
BUSND	42.920.099	48.036.255	49.915.338	0,92	4,40%	3,91%	21,02%	16,30%
BPD	486.827.623	454.161.963	496.723.021	9,18	-6,37%	9,37%	8,30%	2,03%
KCBA	165.610.486	176.261.362	174.426.662	3,22	-2,54%	-1,04%	7,14%	5,32%
Total	5.048.278.426	5.372.841.382	5.410.177.806	100	2,71%	0,69%	7,33%	7,17%

Sumber: SPI Maret 2019

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Mar '18	Des '18	Mar '19	
DKI Jakarta	2.449.713	2.738.785	2.751.826	50,86%
Jawa Timur	480.945	522.879	525.723	9,72%
Jawa Barat	564.416	434.088	434.469	8,03%
Jawa Tengah	254.155	273.928	276.973	5,12%
Sumatera Utara	213.026	214.333	220.260	4,07%
Total DPK 5 Kota	3.962.255	4.184.014	4.209.251	77,80%
Total DPK	5.048.850	5.372.841	5.410.178	

Sumber: SPI Maret 2019, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (69,42%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (10,12%). Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang lebih rendah dari Kredit, BUK melakukan konversi alat likuid menjadi kredit sebagaimana terlihat dari penempatan bank

pada surat berharga yang mengalami kontraksi sebesar -32,26% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,97% (yoy). Di sisi lain, total kredit BUK tumbuh 11,87% (yoy) jauh lebih tinggi dari 9,23% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan karena kredit memberikan *return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat berharga.

Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Mar-18	Des '18	Mar '19		Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Kredit Yang Diberikan	4.598.196	5.155.246	5.143.977	70,23	3,60	-0,22	9,32	11,87
- Kepada Pihak Ketiga	4.553.173	5.092.584	5.085.310	69,42	3,47	-0,14	8,62	11,69
- Kepada Bank Lain	45.023	62.662	58.666	0,80	15,07	-6,38	210,86	30,30
Penempatan pada Bank Lain	266.087	216.704	272.666	3,72	-16,15	25,82	20,32	2,47
Penempatan pada Bank Indonesia:	546.652	729.334	650.723	8,88	19,80	-10,78	-13,12	19,04
Surat Berharga	1.094.606	887.433	741.509	10,12	-6,56	-16,44	18,97	-32,26
Penyertaan	39.123	43.451	43.846	0,60	4,64	0,91	13,74	12,07
CKPN Aset Keuangan	154.045	156.963	160.401	2,19	-2,92	2,19	1,01	4,13
Tagihan Spot dan Derivatif	8.674	22.386	17.360	0,24	-2,83	-22,45	-30,42	100,13
Tagihan Lainnya	239.284	290.506	294.476	4,02	14	1	3,66	23
TOTAL	6.946.669	7.502.023	7.324.958	100	3,13	-2,36	8,42	5,45

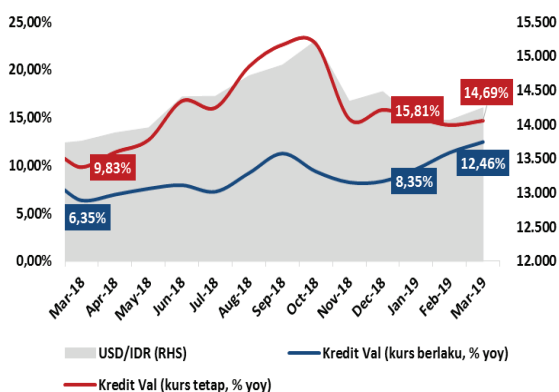
Sumber: SPI Maret 2019

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,391%, sedangkan kredit valas sebesar 15,61%. Kredit rupiah tumbuh tinggi 11,15% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya 8,41% (yoy), sedangkan kredit valas tumbuh

14,69% (yoy) meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 9,83% (yoy), yang antara lain dipengaruhi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD terhadap tahun sebelumnya. Jika menggunakan perhitungan kurs berlaku, kredit valas tumbuh signifikan sebesar 12,46% (yoy) dari

tahun sebelumnya sebesar 6,35% (yoy). Hal tersebut menunjukkan tumbuhnya kredit selain karena naiknya permintaan juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar (Grafik 10).

Grafik 9 Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang

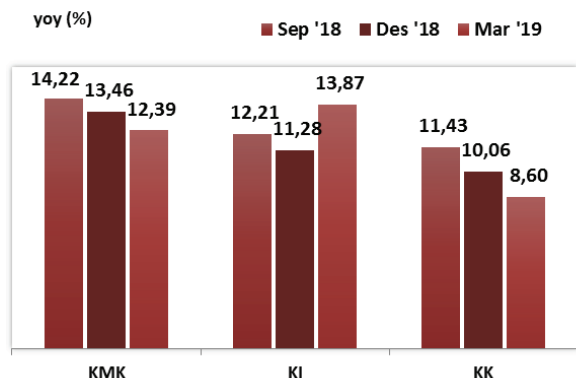


Sumber: SPI Maret 2019

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,38%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,71% dan kredit investasi (KI) sebesar 25,67%, sedangkan sisanya sebesar 27,62% adalah kredit konsumsi (KK).

Kredit produktif tumbuh signifikan 12,91% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya 7,46% (yoy), yang didorong oleh perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan.

Grafik 10 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Maret 2019

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Maret 2019, rentabilitas BUK masih terjaga dengan ROA perbankan naik menjadi 2,60% dari 2,55% pada periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan laba utamanya dari peningkatan keuntungan penjualan surat berharga selain yang berasal dari pendapatan bunga.

Secara umum, hampir semua kelompok BUKU mengalami perlambatan ROA, kecuali BUKU 3 yang mengalami peningkatan ROA menjadi 2,11%.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 82,92% dari 78,76% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO utamanya karena peningkatan beban operasional yang tumbuh sebesar 47,20% (yoy) khususnya dari kerugian transaksi *spot* dan derivatif (beban operasional non bunga). Peningkatan BOPO terbesar terjadi pada BUKU 4 yang naik 506 bps menjadi 77,39%.

Di sisi lain, penurunan NIM perbankan berlanjut dan pada periode laporan turun menjadi 4,86% dari 5,07% tahun sebelumnya, karena perbankan menyesuaikan suku bunga DPK lebih cepat dibandingkan kredit.

Tabel 7 Rasio Perbankan berdasarkan Kelompok Kepemilikan dan BUKU

Rasio	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa	
	Mar '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
ROA	3,02%	3,02%	2,09%	2,11%	1,64%	1,63%
NIM	5,70%	5,24%	4,64%	4,36%	5,72%	5,45%
BOPO	73,66%	79,85%	80,14%	82,20%	85,84%	86,61%
CAR	20,15%	21,46%	20,81%	21,69%	26,93%	26,34%
Rasio	BPD		KCBA		Industri	
	Mar '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
ROA	2,57%	2,25%	2,95%	3,84%	2,55%	2,60%
NIM	6,06%	5,98%	3,38%	4,08%	5,07%	4,86%
BOPO	75,92%	78,53%	88,74%	92,28%	78,76%	82,92%
CAR	20,37%	21,93%	54,95%	49,98%	22,65%	23,42%
Rasio	BUKU 1		BUKU 2			
	Mar '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19		
ROA	1,95%	1,52%	1,78%	1,64%		
NIM	5,54%	5,20%	4,95%	4,82%		
BOPO	82,99%	86,99%	84,06%	85,73%		
CAR	21,16%	22,18%	25,13%	25,35%		
Rasio	BUKU 3		BUKU 4			
	Mar '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19		
ROA	2,01%	2,11%	3,11%	3,11%		
NIM	4,11%	3,94%	5,76%	5,42%		
BOPO	85,14%	89,09%	72,33%	77,39%		
CAR	24,82%	24,89%	20,79%	22,25%		

Sumber: SPI Maret 2019

1.5 Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (79,61%) berupa modal inti. Pada Maret 2019, modal inti tumbuh 14,59% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,71% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan laba dan modal disetor yang masing-masing tumbuh 18,69% (yoy) dan 3,99% (yoy).

Sementara itu, ATMR BUK tercatat tumbuh sebesar 9,02% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,62% (yoy), sehingga CAR BUK naik sebesar 77 bps (yoy) menjadi 23,42%.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 49,98%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR. Seiring dengan tingginya CAR KCBA, CAR yang tinggi berdasarkan BUKU tercatat pada BUKU 2 dan BUKU 3, yang didalamnya banyak terdapat bank KCBA.

Tabel 8 Komponen Permodalan BUK

No	Komponen Modal (Rp T)	Mar-18	Dec-18	Mar-19	mtm	ytd	yoy	Porsi
1	Modal Inti	909,70	1.003,20	1.042,46	1,43%	3,91%	14,59%	79,61%
A	Modal Inti Utama	906,89	1.003,83	1.043,40	1,42%	3,94%	15,05%	79,68%
	Modal disetor	170,45	179,25	177,25	0,35%	-1,11%	3,99%	13,54%
	Cadangan Tambahan Modal	808,39	900,71	938,90	1,29%	4,24%	16,14%	71,70%
	Laba	564,40	648,33	669,88	1,11%	3,32%	18,69%	51,16%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	530,80	509,74	633,62	-1,03%	24,30%	19,37%	48,39%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	33,60	138,59	36,26	62,52%	-73,84%	7,92%	2,77%
	Dana Setoran Modal	2,85	5,43	3,88	6,86%	-28,58%	36,18%	0,30%
	Cadangan Lainnya	241,15	246,96	265,14	1,65%	7,36%	9,95%	20,25%
	Faktor Pengurang	71,95	76,13	72,75	-2,75%	-4,44%	1,11%	5,56%
B	Modal Inti Tambahan	2,80	(0,63)	(0,94)	-8,03%	48,68%	-133,57%	-0,07%
2	Modal Pelengkap	82,79	90,96	91,96	-0,33%	1,10%	11,08%	7,02%
	Surat berharga subordinasi	27,04	26,77	25,00	-5,35%	-6,61%	-7,53%	1,91%
	Pinjaman Subordinasi	15,70	19,14	19,11	1,36%	-0,11%	21,77%	1,46%
	PPA atas aset produktif	47,00	51,57	51,12	1,27%	-0,88%	8,75%	3,90%
	Lainnya	(6,95)	(6,52)	(3,27)	-5,99%	-49,81%	-52,93%	-0,25%
3	CEMA	169	175	175	3,30%	-0,25%	3,37%	13,37%
4	TOTAL MODAL	1.162	1.270	1.309	1,55%	3,14%	12,71%	100%
5	ATMR	5.129	5.527	5.592	-0,17%	1,18%	9,02%	
	ATMR Kredit	4.275	4.692	4.681	-0,04%	-0,24%	9,51%	
	ATMR Operasional	773	772	830	-0,39%	7,63%	7,49%	
	ATMR Pasar	77	68	85	-3,11%	25,33%	9,62%	
Rasio	CAR	22,65%	22,97%	23,42%	(3)	45	77	
	Rasio Modal Inti	20,98%	21,29%	21,77%	7	48	79	

Sumber: SPI Maret 2019

2. Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan I-2019 secara umum mengalami perbaikan, tercermin dari kenaikan CAR BUS (yoy) dengan didukung peningkatan rentabilitas sejalan dengan perbaikan

efisiensi dan perbaikan kualitas pembiayaan (penurunan NPF) bank syariah. Likuiditas bank syariah juga masih memadai dengan FDR berada dalam *threshold* aman.

Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Mar '18	Des '18	Mar '19	Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	428.201	477.327	479.815	↑ 4,47%	↑ 0,52%	↑ 19,36%	↑ 12,05%
Pembiayaan	286.621	320.193	326.993	↑ 3,12%	↑ 2,12%	↑ 14,40%	↑ 14,09%
Dana Pihak Ketiga	339.909	371.828	382.734	↑ 4,61%	↑ 2,93%	↑ 18,78%	↑ 12,60%
- Giro Wadiah	40.081	43.597	48.434	↓ -1,50%	↑ 11,09%	↑ 30,90%	↑ 20,84%
- Tabungan Mudharabah	98.739	114.437	113.660	↑ 8,15%	↓ -0,68%	↑ 15,03%	↑ 15,11%
- Deposito Mudharabah	201.089	213.794	220.640	↑ 4,10%	↑ 3,20%	↑ 18,49%	↑ 9,72%
BUS (%)							
CAR	18,22	20,12	19,85	(113)	(27)	124	164
ROA	1,23	1,28	1,46	(13)	18	11	23
NOM	1,40	1,42	1,66	(17)	23	14	26
BOPO	89,90	89,18	87,82	109	(136)	(244)	(208)
NPF gross	4,56	3,26	3,44	(56)	18	(5)	(112)
FDR	77,63	78,53	78,38	(42)	(15)	(589)	75

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

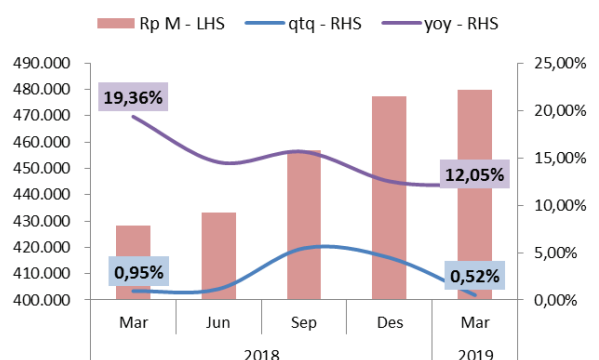
2.1 Aset Bank Syariah

Pada Maret 2019, pangsa aset bank syariah² terhadap total aset perbankan nasional meningkat menjadi 6,14% (Pangsa pada Maret 2018 sebesar 6,01%).

Aset bank syariah tumbuh sebesar 12,05% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,36% (yoy), sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK. Komponen utama aset adalah pembiayaan (65,99%), surat berharga (14,08%) dan penempatan pada Bank Indonesia (11,52%). Perlambatan tersebut utamanya karena perlambatan penempatan Fasilitas

Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) pada periode laporan.

Grafik 11 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah



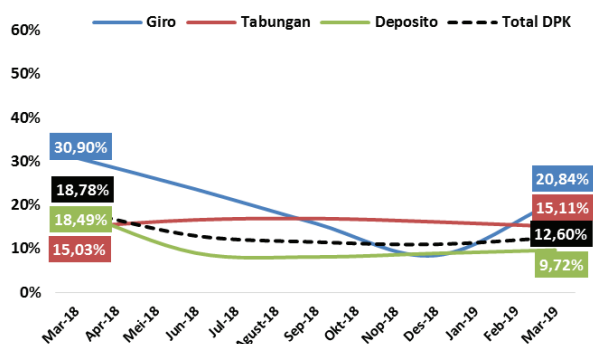
Sumber: SPS Maret 2019

² Sampai dengan Maret 2019, bank syariah terdiri dari 14 BUS dan 20 UUS

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Maret 2019, DPK bank syariah tumbuh 12,60% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,78% (yoy). Perlambatan utamanya pada komponen Deposito yang merupakan komponen dengan porsi terbesar DPK (57,65%) yang tumbuh 9,72% (yoy), jauh melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 18,49% (yoy). Komponen Giro juga melambat menjadi 20,84% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 30,90% (yoy). Adapun tabungan tumbuh 15,11% (yoy) lebih tinggi dari 15,03% (yoy) tahun sebelumnya.

Grafik 12 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Maret 2019

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Dana bank syariah lebih banyak digunakan untuk tujuan pembiayaan. Pada Maret 2019, pembiayaan bank syariah tumbuh 14,09% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 14,40% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi.

Berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan BUS masih didominasi untuk tujuan pembiayaan produktif (56,42%), sedangkan untuk tujuan konsumsi sebesar 43,58%. Pembiayaan produktif tumbuh 11,83% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,99% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi melambatnya pembiayaan modal kerja yang hanya tumbuh 9,30% (yoy) (Maret 2018=13,75%, yoy), sementara pembiayaan investasi tumbuh tinggi 15,48% (yoy) (Maret 2018=11,92%, yoy). Pembiayaan konsumsi juga mencatatkan pertumbuhan lebih baik yaitu sebesar 17,16% (yoy), meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya 16,37% (yoy).

Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

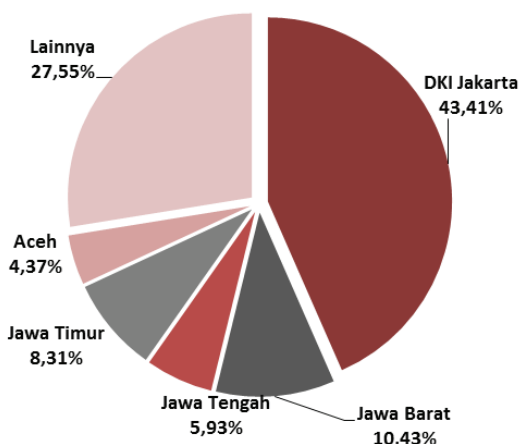
JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp. Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Mar '18	Des '18	Mar '19		Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Modal Kerja	97.471	105.055	106.532	32,58	1,52	1,41	13,75	9,30
Investasi	67.502	75.730	77.950	23,84	4,21	2,93	11,92	15,48
Konsumsi	121.648	139.408	142.511	43,58	3,75	2,23	16,37	17,15
Total	286.621	320.193	326.993	100	3,12	2,12	14,40	14,09

Sumber: SPS, Maret 2019

Di tengah melambatnya pertumbuhan pembiayaan, rasio NPF *gross* BUS tercatat membaik yaitu sebesar 3,26%, lebih rendah dari 3,82% pada tahun sebelumnya. Secara umum, perbaikan risiko pembiayaan terjadi hampir pada semua sektor ekonomi dan didorong oleh sektor-sektor utama, diantaranya sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, konstruksi, transportasi, pergudangan dan komunikasi serta industri pengolahan.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,19%, khususnya DKI Jakarta (43,41%), Jawa Barat (10,43%), Jawa Timur (8,31%), dan Jawa Tengah (5,93%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Grafik 13 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



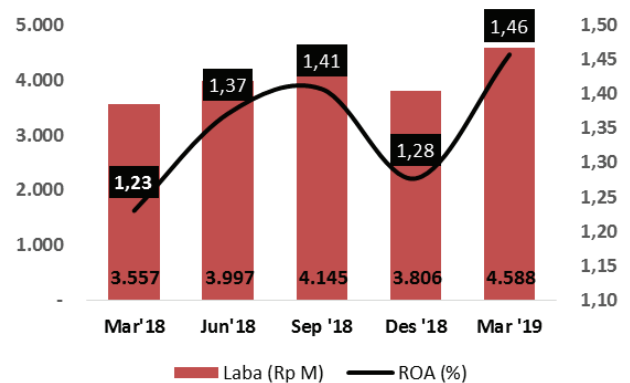
Sumber: SPS Maret 2019

2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu tercermin dari

kenaikan ROA menjadi 1,46% dari 1,23% pada tahun sebelumnya, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan laba bersih BUS yaitu sebesar 38,08% (yoy). Peningkatan laba BUS utamanya disebabkan perbaikan NOM BUS yang meningkat menjadi 1,66% dari 1,40% pada tahun sebelumnya serta perbaikan efisiensi dengan BOPO turun menjadi 87,82% dari 89,90% pada tahun sebelumnya. Turunnya rasio BOPO utamanya didorong oleh meningkatnya pendapatan operasional dari pembiayaan yang diberikan yang tumbuh 7,67% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,17% (yoy).

Grafik 14 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Maret 2019

2.5 Permodalan BUS

Permodalan BUS didominasi oleh modal inti yaitu 90,52% dari total modal. Pada Maret 2019, modal BUS tumbuh 12,97% (yoy) ditopang peningkatan laba dan tambahan modal disetor oleh pemilik.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat melambat sebesar 4,41% (yoy), seiring dengan melambatnya penyaluran pembiayaan BUS. Dengan pertumbuhan modal yang jauh lebih tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS terdongkrak sebesar 164 bps menjadi 19,85%.

Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit.

3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)

Fungsi intermediasi BPR berjalan cukup baik, tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit. Ketahanan BPR juga masih solid yang terlihat dari tingkat

permodalan (CAR) yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit (NPL).

Tabel 11 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Mar '18	Des '18	Mar '19	Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Total Aset (Rp milyar)	127.528	135.693	137.440	↑ 3,18%	↑ 1,29%	↑ 11,02%	↑ 7,77%
Kredit (Rp milyar)	91.655	98.220	101.465	↑ 2,53%	↑ 3,30%	↑ 8,67%	↑ 10,70%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	86.361	91.956	93.782	↑ 3,62%	↑ 1,99%	↑ 11,85%	↑ 8,59%
- Tabungan (Rp milyar)	26.999	29.491	29.609	↑ 5,57%	↑ 0,40%	↑ 14,40%	↑ 9,66%
- Deposito (Rp milyar)	59.362	62.465	64.173	↑ 2,72%	↑ 2,73%	↑ 10,73%	↑ 8,11%
CAR (%)	24,10	23,35	24,19	60	84	38	9
ROA (%)	2,68	2,48	2,42	(1)	(6)	(8)	(26)
BOPO (%)	80,59	80,74	81,92	(50)	118	(22)	133
NPL Gross (%)	6,81	6,37	6,94	(79)	57	13	13
NPL Net (%)	5,10	4,74	5,28	(63)	54	21	18
LDR (%)	75,43	76,54	77,36	(40)	82	(157)	193
CR (%)	16,93	18,84	15,01	266	(383)	167	(192)

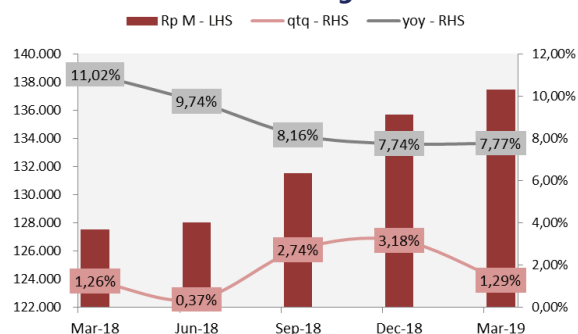
Sumber: SPI, Maret 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPR

Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 7,77% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,02% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset BPR utamanya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan DPK BPR. Selain itu, banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh BPR untuk pengembangan baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia juga disinyalir menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan aset pada periode ini.

Jumlah BPR pada periode laporan adalah sebanyak 1.593 BPR, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.615 BPR. Pengurangan jumlah BPR utamanya terjadi pada BPR dengan kelompok aset Rp1-5 Miliar dan kelompok aset Rp5-10 Miliar. Berkurangnya jumlah BPR utamanya disebabkan konsolidasi beberapa BPR dan adanya BPR yang dilikuidasi.

Grafik 15 Perkembangan Aset BPR

Sumber: SPI, Maret 2019

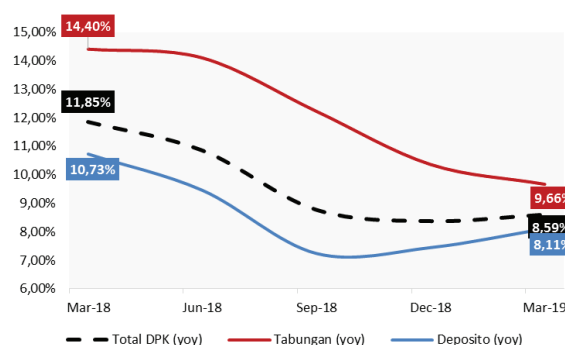
Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (57,31%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 23,34% dan 13,71%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Maluku Utara sebesar 59,14% (yoy), meskipun memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (0,13%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tumbuh 11,02% (yoy).

3.2 Sumber Dana BPR

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 82,84%, diikuti pinjaman yang diterima (11,63%), antar bank pasiva (4,73%), dan kewajiban segera (0,79%).

DPK BPR tumbuh 8,59% (yoy), melambat dibandingkan 11,85% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan terjadi pada kedua komponen, baik tabungan maupun deposito yang tercatat masih tumbuh masing-masing sebesar 9,66% (yoy) dan

8,11% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK BPR antara lain diakibatkan oleh persaingan perebutan dana dengan perusahaan *financial technology peer to peer (P2P) lending* yang sedang berkembang. Untuk menyikapi hal tersebut, OJK mengupayakan konsolidasi BPR disertai penguatan permodalan BPR melalui pemenuhan kewajiban modal minimum.

Grafik 16 Perkembangan DPK BPR

Sumber: SPI, Maret 2019

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (68,43%). Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (59,64%), diikuti Sumatera (18,36%), Bali-Nusa Tenggara (13,74%), Sulampua (6,17%), dan Kalimantan (2,09%). Seiring dengan besaran asetnya, penghimpunan DPK utamanya juga berada di Jawa Tengah (25,92%) dan Jawa Barat (13,46%).

Pertumbuhan DPK BPR terbesar terdapat di Maluku Utara yang tumbuh 60,01% (yoy), meskipun dengan porsi yang tidak terlalu besar.

Tabel 12 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar-18	Des '18	Mar '19		Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Sumatera	16.347	16.738	17.215	18,36%	0,91%	2,85%	7,94%	5,31%
Jawa	51.555	55.059	55.933	59,64%	4,39%	1,59%	12,62%	8,49%
Kalimantan	1.918	2.059	1.962	2,09%	-0,36%	-4,75%	6,72%	2,27%
Bali dan Nusa Tenggara	11.192	12.479	12.887	13,74%	4,53%	3,27%	14,11%	15,15%
Sulawesi, Maluku dan Papua	5.349	5.621	5.785	6,17%	3,90%	2,92%	14,19%	8,16%
Jumlah	86.361	91.956	93.782	100%	3,62%	1,99%	11,85%	8,59%

Sumber: SPI, Maret 2019

3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 76,73% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 23,27%. Kredit BPR pada Maret 2019 tumbuh 10,70% (yoy), meningkat dibandingkan 8,67% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan penyaluran kredit di BUK, penyaluran kredit BPR juga masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 25,05%) yang tumbuh 9,65% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi di sektor perantara keuangan yang tumbuh 58,75% (yoy) namun hanya berkontribusi kecil dengan porsi sebesar 0,38% terhadap total kredit BPR.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,61%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (45,01%) dan Kredit Investasi (7,60%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi (47,39%).

Pertumbuhan kredit BPR utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar 12,11% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,58% (yoy). Penyaluran KMK BPR utamanya disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (50,26% dari total penyaluran KMK) yang tumbuh 8,84% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,12% (yoy). Selain itu sektor konstruksi juga tumbuh tinggi 37,81% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 26,04 % (yoy).

Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp Miliar)			Porsi		yoy		
	Mar '18	Des '18	Mar '19	Mar '19	Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	5.493	5.635	5.865	5,78%	2,32%	4,09%	7,61%	6,78%
Perikanan	368	426	432	0,43%	6,29%	1,31%	10,95%	17,17%
Pertambangan dan Penggalian	232	282	319	0,31%	15,20%	12,85%	39,27%	37,41%
Industri Pengolahan	1.292	1.494	1.527	1,50%	5,70%	2,18%	17,04%	18,22%
Listrik, Gas dan Air	95	137	140	0,14%	19,44%	2,29%	18,22%	46,82%
Konstruksi	2.729	3.644	3.772	3,72%	5,26%	3,53%	27,32%	38,24%
Perdagangan Besar dan Eceran	23.178	24.681	25.415	25,05%	1,47%	2,97%	7,10%	9,65%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	910	1.089	1.205	1,19%	9,42%	10,68%	22,19%	32,49%
Transportasi, Pergudangan dan Perantara Keuangan	1.961	2.296	2.380	2,35%	10,62%	3,62%	9,88%	21,37%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	242	379	384	0,38%	12,60%	1,38%	34,80%	58,75%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	164	148	146	0,14%	-4,11%	-1,48%	44,02%	-11,28%
Jasa Pendidikan	278	342	375	0,37%	11,57%	9,56%	21,82%	34,79%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242	275	279	0,27%	8,16%	1,32%	16,32%	15,08%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	2.394	2.549	2.596	2,56%	1,90%	1,85%	8,29%	8,47%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1.073	1.212	1.234	1,22%	5,62%	1,80%	5,08%	14,96%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	4.243	4.382	4.451	4,39%	0,72%	1,59%	3,82%	4,92%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	4.084	4.369	4.495	4,43%	1,91%	2,89%	10,21%	10,08%
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	40.249	42.187	43.593	42,96%	2,14%	3,33%	7,34%	8,31%
TOTAL	91.655	98.220	101.465	100%	2,53%	3,30%	8,67%	10,70%

Sumber: SPI, Maret 2019

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (56,96%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,67%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas (4.732 BPR) berada di wilayah Jawa (75,15%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,10% dari total BPR Nasional (132 BPR).

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat dengan rasio NPL *gross* sebesar 6,94%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6,81%. NPL BPR meningkat 12,71% (yoy) dibanding tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan penyaluran kredit BPR.

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '18	Des '18	Mar '19		Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Sumatera	18.417	19.722	20.274	19,98%	3,08%	2,80%	6,80%	10,08%
Jawa	51.806	55.698	57.793	56,96%	2,44%	3,76%	9,55%	11,56%
Kalimantan	1.509	1.677	1.695	1,67%	4,15%	1,07%	3,56%	12,37%
Bali dan Nusa Tenggara	11.310	12.055	12.351	12,17%	3,09%	2,45%	5,85%	9,20%
Sulawesi, Maluku dan Papua	8.613	9.069	9.352	9,22%	0,82%	3,12%	12,34%	8,58%
Jumlah	91.655	98.220	101.465	100%	2,53%	3,30%	8,67%	10,70%

Sumber: SPI, Maret 2019

3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, dengan ROA yang turun menjadi 2,42% atau lebih rendah sebesar 26 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,48%). Hal tersebut dipengaruhi melambatnya laba operasional yang hanya tumbuh 1,71% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,77% (yoy). Selain itu, BOPO juga meningkat menjadi 81,92% dibanding tahun sebelumnya (80,59%). Perlambatan laba BPR terjadi seiring dengan meningkatnya beban bunga deposito yang tumbuh 11,13% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,85% (yoy). Peningkatan beban bunga tersebut sejalan dengan kenaikan BI7DRR yang ikut meningkatkan rerata suku bunga deposito serta semakin tingginya persaingan perebutan dana antara BPR dengan P2P *lending*.

3.5 Permodalan BPR

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR tercatat meningkat sebesar 24,19%. Kenaikan CAR tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi.

Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat kestabilan dan ketangguhan BPR, OJK mengarahkan BPR untuk dapat memperkuat permodalannya, utamanya dalam komponen modal inti sebesar minimum Rp3 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti dibawah Rp3 miliar) dan Rp6 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti antara Rp3 s.d. < Rp6 miliar) pada Desember 2019 (POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan

Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan I-2019 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 11,64% (yoy), 16,32% (yoy), dan 12,33% (yoy). Risiko pembiayaan juga melanjutkan tren penurunan walaupun masih pada level yang cukup tinggi. Sementara itu Ketahanan BPRS yang tercermin pada permodalan juga cukup baik.

Tabel 15 Indikator Umum BPRS

Indikator	Mar '18	Des '18	Mar '19	qtq		yoy	
				Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Total Aset (Rp Miliar)	11.115	12.362	12.410	↑ 3,92%	↑ 0,39%	↑ 17,96%	↑ 11,64%
Pembiayaan (Rp Miliar)	8.078	9.084	9.397	↑ 4,66%	↑ 3,44%	↑ 14,73%	↑ 16,32%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	7.243	8.135	8.136	↑ 5,11%	↑ 0,01%	↑ 20,32%	↑ 12,33%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2.577	2.998	2.911	↑ 9,79%	↓ -2,91%	↑ 19,94%	↑ 12,94%
- Deposito iB (Rp Miliar)	4.666	5.137	5.225	↑ 2,56%	↑ 1,72%	↑ 20,54%	↑ 11,99%
CAR (%)	20,60	19,33	20,19	(45)	86	(93)	(41)
ROA (%)	2,38	1,87	2,36	(42)	49	9	(2)
BOPO (%)	84,28	87,66	87,00	148	(66)	(85)	272
NPF Gross (%)	10,98	9,30	8,71	(229)	(60)	104	(227)
FDR (%)	111,53	111,67	115,50	(48)	383	(545)	397

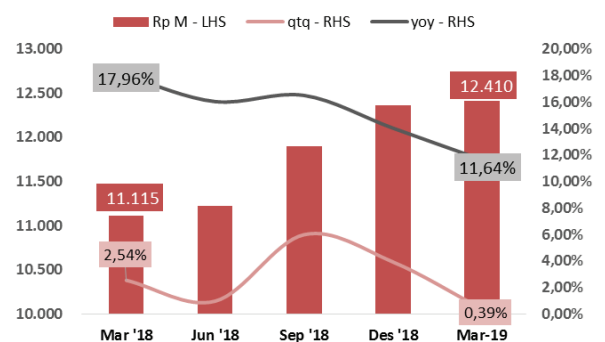
Sumber: SPS Maret 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada Maret 2019, aset BPRS tercatat sebesar Rp12,41 triliun atau tumbuh 11,64% (yoy), melambat dibanding 17,96% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK dan terkontraksinya laba yang mempengaruhi perlambatan modal.

Grafik 17 Tren Aset BPRS



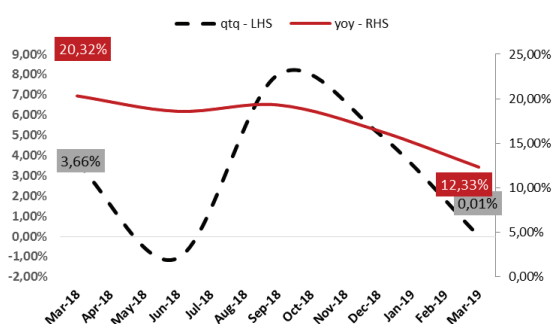
Sumber: SPS Maret 2019

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 75,88% atau mencapai Rp8,14 triliun. DPK BPRS tumbuh 12,33% (yoy), jauh melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2018 sebesar 20,32% (yoy). Perlambatan DPK terjadi baik pada deposito *Islamic Bank* (iB) yang tumbuh 11,99% (yoy) (Mar-18=20,54%, yoy) maupun tabungan iB yang tumbuh 12,94% (yoy) (Mar-18=19,94%, yoy).

Secara triwulanan, DPK BPRS tumbuh sebesar 0,01% (qtq), melambat dibanding Desember 2018 yang tumbuh 5,11% (qtq). Perlambatan tersebut didorong oleh deposito iB yang tumbuh melambat 1,72% (qtq) dan tabungan iB yang turun -2,91% (qtq).

Grafik 18 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Maret 2019

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 64,22% yang utamanya (36,08% atau senilai Rp2,94 triliun) dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan.

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Maret 2019, dana BPRS sebagian besar (75,72%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp9,40 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 16,32% (yoy), meningkat dari 14,73% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan perbaikan kualitas pembiayaan BPRS yang tercermin dari penurunan NPF *gross* menjadi 8,71% (Maret 2018 = 10,98%).

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 21,52%, yang tumbuh tinggi sebesar 9,49% (yoy) (Maret 2018=7,65%, yoy). Sementara pertumbuhan pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor perindustrian yang tumbuh 74,70% (yoy) sejalan dengan mulai membaiknya kegiatan usaha, meskipun dengan porsi yang kecil (1,56%).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS masih didominasi untuk tujuan konsumsi (48,42%), yang tumbuh 22,97% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 23,06% (yoy). Sementara itu, secara umum pertumbuhan pembiayaan produktif meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pembiayaan investasi tercatat melambat 5,35% (yoy) (Maret 2018=7,41%, yoy), namun pembiayaan modal kerja tercatat tumbuh cukup tinggi. Pembiayaan modal kerja yang memiliki porsi 36,67% dari total penyaluran pembiayaan BPRS tumbuh 13,04% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,01% (yoy).

Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

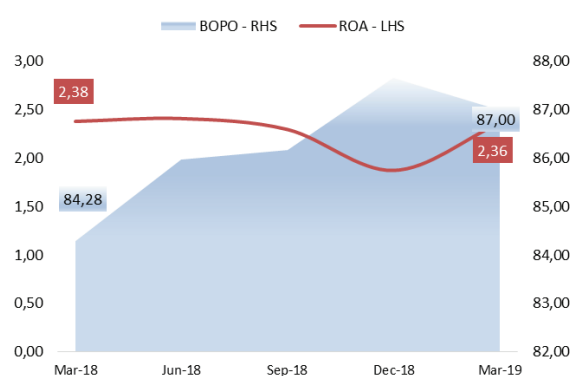
Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar	Des '18	Mar '19		Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	369.158	374.467	318.461	3,39%	-1,68%	-14,96%	1,99%	-13,73%
Pertambangan	18.658	19.889	26.487	0,28%	1,36%	33,17%	30,00%	41,96%
Perindustrian	83.685	119.758	146.368	1,56%	14,11%	22,22%	25,40%	74,90%
Listrik, gas dan air	13.856	13.104	14.831	0,16%	14,88%	13,18%	39,28%	7,03%
Konstruksi	579.628	694.666	727.184	7,74%	4,05%	4,68%	20,10%	25,46%
Perdagangan, restoran dan hotel	1.847.229	2.032.457	2.022.491	21,52%	4,88%	-0,49%	7,65%	9,49%
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	99.704	103.582	108.211	1,15%	2,37%	4,47%	4,72%	8,53%
Jasa dunia usaha	644.929	618.505	704.207	7,49%	-21,24%	13,86%	-4,09%	9,19%
Jasa sosial/masyarakat	721.432	769.445	778.692	8,29%	0,86%	1,20%	17,24%	7,94%
Lain-lain	3.699.956	4.338.594	4.550.011	48,42%	11,02%	4,87%	23,06%	22,97%
TOTAL	8.078.236	9.084.467	9.396.942	100%	4,66%	3,44%	14,73%	16,32%

Sumber: SPS Maret 2019

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami sedikit tekanan, tercermin dari rasio ROA sebesar 2,36% sedikit menurun dari 2,38% pada tahun sebelumnya. Penurunan ROA tersebut didorong oleh tergerusnya laba BPRS sebesar 13,72% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,84% (yoy). Meskipun pendapatan BPRS secara umum tercatat meningkat, namun peningkatan beban operasional yang tinggi mendorong kenaikan BOPO ke level 87,00% (Maret 2018=84,28%), serta seiring dengan upaya penguatan permodalan BPR melalui penambahan fungsi manajemen risiko dan penguatan operasional yang ikut andil dalam kenaikan biaya non bunga.

Grafik 19 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Maret 2019

4.5 Permodalan BPRS

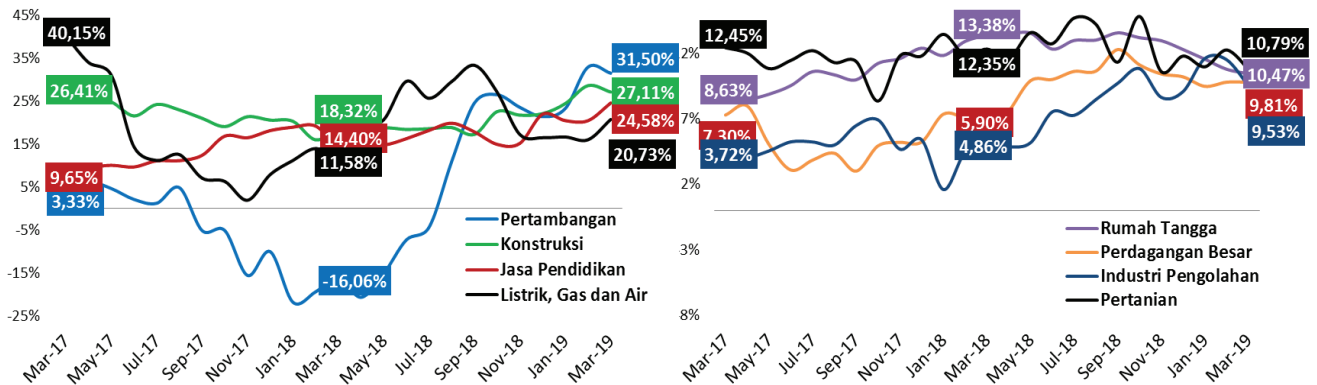
Permodalan BPRS relatif cukup kuat meskipun CAR menurun 41 bps (yoy) menjadi 20,19% dibanding tahun sebelumnya sebesar 20,60%. Penurunan CAR tersebut utamanya disebabkan penurunan laba sementara ATMR naik seiring kenaikan pembiayaan. Meskipun demikian, CAR BPRS tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 18,38% dan 16,42%.

Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,72% terhadap total kredit.

Grafik 20 Pertumbuhan Tahunan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: SPI, Maret 2019

Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Mar '18	Des '18	Mar '19	Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	319,60	354,88	354,08	4,82%	-0,23%	12,35%	10,79%	6,69%
2	Perikanan	10,64	12,14	12,34	5,36%	1,70%	8,74%	16,01%	0,23%
3	Pertambangan dan Penggalian	104,75	137,91	137,75	0,53%	-0,12%	-16,06%	31,50%	2,60%
4	Industri Pengolahan	793,33	899,09	868,89	3,47%	-3,36%	4,86%	9,53%	16,42%
5	Listrik, gas dan air	154,24	170,19	186,86	-1,90%	9,80%	11,58%	21,15%	3,53%
6	Konstruksi	254,71	316,10	323,78	8,67%	2,43%	18,32%	27,11%	6,12%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	885,84	975,99	972,70	1,51%	-0,34%	5,90%	9,81%	18,38%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	97,37	99,75	100,37	2,00%	0,62%	3,14%	3,08%	1,90%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	192,10	217,32	213,97	3,45%	-1,54%	12,29%	11,38%	4,04%
10	Perantara Keuangan	211,49	244,49	232,26	8,21%	-5,00%	7,72%	9,82%	4,39%
11	Real Estate	225,52	248,22	253,84	4,13%	2,26%	9,02%	12,56%	4,80%
12	Administrasi Pemerintahan	21,98	25,07	26,01	1,92%	3,74%	-2,91%	18,31%	0,49%
13	Jasa Pendidikan	10,17	12,32	12,66	9,76%	2,77%	14,40%	24,58%	0,24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,80	22,70	23,12	11,92%	1,84%	19,52%	16,76%	0,44%
15	Jasa Kemasyarakatan	70,72	79,91	81,27	6,24%	1,70%	20,89%	14,93%	1,54%
16	Jasa Perorangan	2,70	2,72	2,73	0,86%	0,69%	2,30%	1,14%	0,05%
17	Badan Internasional	0,15	0,17	0,17	28,99%	-0,62%	-20,40%	13,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	3,49	2,26	1,59	-11,27%	-29,45%	45,69%	-54,34%	0,03%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.136,12	1.237,82	1.254,41	3,68%	1,34%	13,38%	10,41%	23,71%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	228,53	235,84	232,42	0,20%	-1,45%	3,01%	1,70%	4,39%
Industri		4.743	5.295	5.291	3,41%	-0,07%	8,54%	11,55%	100%

Sumber: SPI, Maret 2019

Penyaluran kredit bank umum triwulan I-2019 tumbuh 11,55% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,54% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kredit seiring dengan masih kuatnya konsumsi domestik. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 31,50% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 16,06% (yoy). Pertumbuhan kredit di semua sub-sektor pertambangan meningkat, dengan yang utama didorong oleh sub-sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh 77,44% (yoy), setelah tahun sebelumnya terkontraksi sangat dalam 32,75% (yoy). Secara umum, pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan tersebut sesuai dengan harga minyak dalam 1 (satu) tahun terakhir yang cenderung stabil dan mulai mengalami peningkatan sejak awal tahun 2019. Penyaluran di sektor ini masih didominasi oleh Bank BUMN.

Pada periode laporan, kredit ke sektor konstruksi juga tercatat tumbuh tinggi, yaitu 27,11% (yoy), seiring dengan pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh sub-sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil khususnya untuk pembangunan jalan tol yang tumbuh 82,22% (yoy). Hal ini sesuai dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar daerah serta mempersingkat waktu tempuh transportasi dan jaringan logistik melalui pembangunan jalan tol sepanjang 1.070 km pada tahun 2019.

Sektor jasa pendidikan juga tumbuh tinggi, 24,58% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil (0,23%). Pertumbuhan pada sektor ini

didorong oleh sub-sektor jasa pendidikan dasar yang tumbuh 40,87% (yoy) dan sub-sektor jasa pendidikan tinggi (32,54%, yoy).

Selain itu, sektor listrik, gas dan air juga masih melanjutkan ekspansi kredit yang cukup agresif. Pada periode laporan, sektor ini tumbuh 3,38% (yoy), utamanya pada sub-sektor ketenagalistrikan lainnya. Hal ini sesuai dengan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang masih berjalan selama periode 2015 – 2019, dimana kebutuhan investasi untuk pengembangan sektor kelistrikan sangat besar, baik untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun *Independent Power Producer* (IPP). Pembiayaan ke sektor ini dari perbankan dilakukan secara bilateral (bank langsung kepada debitur di sektor ini), maupun secara sindikasi.

Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini mayoritas kredit masih didominasi sektor rumah tangga (23,71%) yang tumbuh melambat menjadi 10,41% (yoy) dari sebelumnya sebesar 13,38% (yoy). Kredit sektor ini utamanya untuk sub-sektor pemilikan rumah tinggal dan pemilikan kendaraan bermotor yang pada periode ini masing-masing tumbuh 12,85% (yoy) dan 9,46% (yoy). Selama satu tahun terakhir, kredit sub-sektor kepemilikan rumah tinggal memiliki tren meningkat sedangkan kredit ke sub-sektor pemilikan kendaraan bermotor justru menunjukkan tren melambat.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (18,38%). Kredit di sektor ini juga mencatatkan pertumbuhan 9,81% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

yang tumbuh 5,90% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya berasal dari perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor makanan, minuman dan tembakau – utamanya beras yang masih tumbuh 30,32% (yoy), meskipun mulai menunjukkan tren perlambatan.

Sektor industri pengolahan juga merupakan salah satu sektor dengan penyaluran kredit terbesar pada periode ini, yaitu sebesar 16,42% dengan porsi terbesar disalurkan kepada sub-sektor industri makanan dan minuman serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Kredit sektor industri pengolahan tumbuh 9,53% (yoy), meningkat tinggi dibandingkan 4,86% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Kredit ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar, 6,69% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat semakin melambat. Pada Maret 2019, pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tumbuh sebesar 11,31% (yoy), melambat dari pertumbuhan pada Maret 2018 sebesar 13,02% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit di sub-sektor perkebunan kelapa sawit ini seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan menurunnya harga CPO di pasar global.

6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR

Pada triwulan I-2019, kredit UMKM tumbuh 11,36% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,95% (yoy). Peningkatan kredit UMKM ditopang oleh sektor perdagangan besar, diikuti sektor pengolahan dan pertanian seiring dengan

porsi penyaluran ke sektor tersebut yang cukup besar. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran UMKM ke sektor pertambangan dan penggalian tumbuh tertinggi yaitu sebesar 26,25% (yoy).

Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi		qtq		yoy	
	Mar '18	Des '18	Mar '19	Mar '19	Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19	
Perdagangan besar dan eceran									
Baki Debet	462.998	499.248	508.620	51,96%	2,50%	1,88%	6,79%	9,85%	
NPL	18.914	17.170	18.552	3,65%	-9,44%	8,05%	-1,10%	-1,91%	
Industri pengolahan									
Baki Debet	90.551	99.028	99.130	10,13%	4,63%	0,10%	7,61%	9,47%	
NPL	3.534	3.292	3.551	3,58%	-9,56%	7,87%	-0,06%	0,48%	
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	81.509	89.560	92.741	9,47%	6,77%	3,55%	19,91%	13,78%	
NPL	2.592	2.073	2.354	2,54%	-7,00%	13,56%	-10,37%	-9,18%	
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	3.457	4.307	4.513	0,46%	48,98%	4,78%	25,75%	30,55%	
NPL	708	135	150	3,32%	9,76%	11,11%	413,04%	-78,81%	
Lainnya									
Baki Debet	240.468	277.829	273.867	27,98%	8,13%	-1,43%	13,97%	13,89%	
NPL	13.524	9.751	10.423	3,81%	-9,06%	6,89%	11,61%	-22,93%	
Baki Debet UMKM	878.983	969.972	978.871		4,81%	0,92%	9,95%	11,36%	
NPL UMKM	39.272	32.421	35.030	3,58%	-9,12%	8,05%	3,87%	-10,80%	

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, Maret 2019

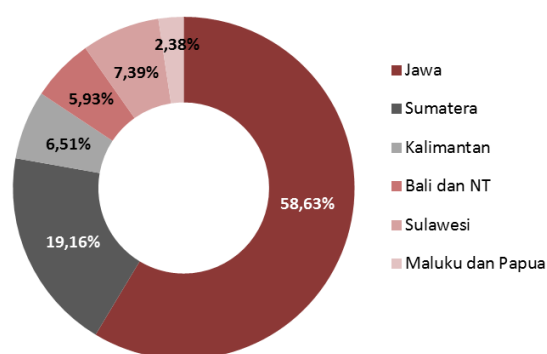
Kualitas kredit UMKM juga membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 4,47% menjadi 3,58%. Perbaikan NPL tersebut terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi, utamanya pada sektor listrik, air, dan gas dengan penurunan NPL UMKM menjadi 3,32%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,63%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,21%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Sulawesi Barat dan Maluku yang tumbuh

masing-masing 25,39% (yoy) dan 23,74% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (57,73%) dan BUSN (34,29%). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit UMKM KCBA dan bank Campuran tumbuh tertinggi sebesar 24,62% (yoy), diikuti pertumbuhan kredit UMKM BUMN sebesar 12,26% (yoy).

Grafik 21 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Maret 2019

Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '18	Des '18	Mar '19		Des '18	Mar '19	Mar '18	Mar '19
BUMN	503.402	551.935	565.123	57,73%	3,56%	2,39%	10,90%	12,26%
BUSN	305.460	338.455	335.700	34,29%	7,84%	-0,81%	8,48%	9,90%
BPD	62.705	70.089	68.805	7,03%	-1,22%	-1,83%	10,19%	9,73%
KCBA dan Campuran	7.416	9.493	9.242	0,94%	24,03%	-2,64%	6,05%	24,62%
Total UMKM	878.983	969.972	978.871	100%	4,81%	0,92%	9,95%	11,36%

Sumber: SPI Maret 2019

Dalam mendorong perkembangan sektor UMKM, Pemerintah menyelenggarakan program KUR. Realisasi penyaluran KUR tahun 2019, sampai dengan 31 Maret 2019 sudah mencapai Rp37,56 T (27,02% dari target tahun 2019 sebesar Rp140 T). Penyaluran KUR tersebut masih didominasi untuk skema KUR Mikro (62,47%), diikuti KUR Kecil (37,01%), dan KUR penempatan TKI (0,52%).

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan yaitu sebesar Rp21,71T. Berdasarkan wilayah penyebaran, penyaluran KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (54,32%) dan Sumatera (20,32%) sejalan dengan besarnya penyebaran UMKM di kedua wilayah tersebut.

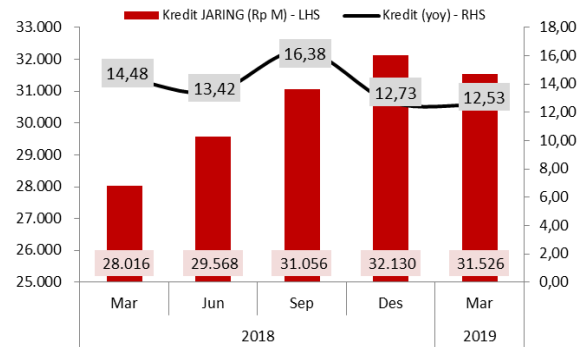
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Maret 2019, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp31,53 triliun atau tumbuh 12,53% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya (14,48%, yoy). Perlambatan terjadi utamanya pada sub-sektor budidaya dan industri pengolahan, masing-masing hanya tumbuh 6,67% (yoy) dan 6,21% (yoy). Pertumbuhan masih cukup baik di sektor ini ditopang oleh sub-sektor penangkapan dan perdagangan dalam negeri serta ekspor hasil perikanan yang masing-masing tumbuh 22,88% (yoy) dan 14,21% (yoy).

Risiko kredit (NPL) di sektor kelautan dan perikanan tercatat 3,48%, meningkat dari 1,38% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan NPL tersebut lebih disebabkan memburuknya kualitas kredit di sub-sektor penangkapan ikan tuna dan budidaya biota laut udang. Sementara itu,

perbaikan NPL terdapat pada sub-sektor jasa sarana produksi dan perdagangan.

Grafik 22 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
	Mar	Des	Mar
Penangkapan	3,33	2,16	8,89
Budidaya	2,41	1,20	5,20
Jasa sarana produksi	5,56	2,92	3,70
Industri Pengolahan	0,83	0,34	0,42
Perdagangan	2,51	1,75	2,13
NPL	2,25	1,38	3,48

Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih terjaga ditandai rasio NPL yang menurun, likuiditas yang memadai, dan risiko pasar yang menurun. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi kenaikan risiko ke depan terkait pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK serta ketidakpastian perekonomian global.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada periode laporan, eksposur risiko terhadap aset perbankan sedikit menurun dari tahun sebelumnya, tercermin dari pertumbuhan ATMR pada Maret 2019 sebesar 9,02% (yoy), lebih rendah dari 9,62% (yoy) pada Maret 2018. Melambatnya kenaikan ATMR tersebut didorong oleh ATMR Pasar dan ATMR Operasional sementara ATMR Kredit tumbuh lebih tinggi. Kenaikan pertumbuhan ATMR kredit pada periode laporan sejalan dengan pertumbuhan kredit yang cukup tinggi, utamanya kredit kepada sektor swasta dan perseorangan yang memiliki bobot risiko yang lebih besar.

ATMR Pasar dan ATMR Operasional tumbuh melambat dari tahun sebelumnya masing-masing 59,78% (yoy) dan 9,86% (yoy) menjadi 9,62% (yoy) dan 7,49% (yoy). Penurunan ATMR Pasar yang cukup signifikan dipengaruhi kondisi nilai tukar IDR/USD yang relatif stabil pada periode laporan ditengah arah kebijakan FFR yang mulai *dovish* sehingga berpengaruh pada penurunan *yield* SBN.

Tabel 21 Perkembangan ATMR

Komponen ATMR (Rp T)	Mar '19	yoy		
		Mar '18	Des '18	Mar '19
ATMR Kredit	4.681	8,79%	10,06%	9,51%
ATMR Operasional	830	9,86%	9,75%	7,49%
ATMR Pasar	85	59,78%	1,56%	9,62%
Total ATMR	5.592	9,62%	9,88%	9,02%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

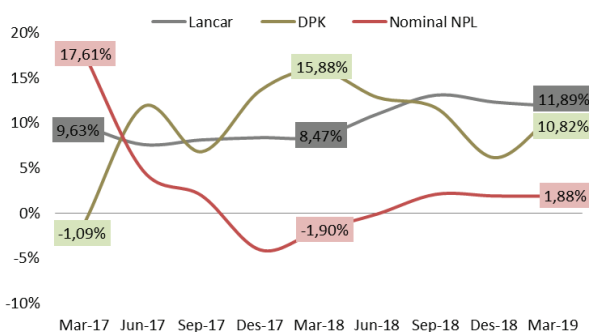
Risiko kredit pada periode laporan sedikit melandai dengan ditandai penurunan rasio NPL. Pada Maret 2019, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,51% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,75% pada Maret 2018. Searah dengan NPL *gross*, NPL *net* juga turun dari 1,25% menjadi 1,15% pada periode laporan. Penurunan rasio NPL tersebut sejalan dengan penyaluran kredit yang tumbuh cukup signifikan sebesar 11,55% (yoy) dengan dibarengi yang diikuti perbaikan kualitas kredit, sebagaimana terlihat dari rasio *Loan at Risk* yang sedikit menurun dari 7,94% menjadi 7,70%. Meskipun kualitas kredit sedikit membaik, namun potensi kenaikan NPL perlu diwaspadai mempertimbangkan terjadinya penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan domestik.

Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit

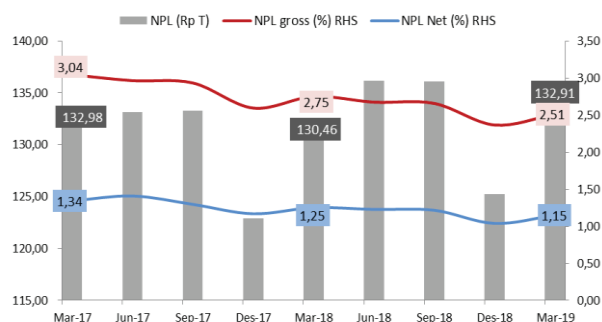
Kualitas Kredit	Mar '18	Des '18	Mar '19	Porsi	qtq		yoy	
					Des '18	Mar '19	Mar-18	Mar '19
1. Lancar	4.346	4.931	4.863	91,91%	4,68%	-1,38%	8,47%	11,89%
- Non Restru	4.236	4.806	4.751	89,79%	4,64%	-1,15%	8,89%	12,15%
- Restru	110	125	112	2,12%	6,53%	-10,18%	-5,48%	1,94%
2. DPK	266	238	295	5,58%	-12,83%	23,90%	15,88%	10,82%
3. Kurang Lancar	20	20	16	0,31%	-7,91%	-19,62%	-26,81%	-18,78%
4. Diragukan	25	17	24	0,45%	-24,14%	41,21%	37,68%	-4,35%
5. Macet	86	88	93	1,76%	-4,07%	5,40%	-2,15%	8,54%
Nominal NPL	130	125	133		-7,94%	6,11%	-1,90%	1,88%
Rasio NPL %	2,75%	2,37%	2,51%		-29	15	-29	-24
Loan at Risk (Kual. 2 + Restru kual.1)	377	363	408		-7,01%	12,17%	8,69%	8,23%
Rasio Loan at Risk %	7,94%	6,86%	7,70%		-77	84	1	-24
Total Kredit	4.743	5.295	5.291		3,41%	-0,07%	8,54%	11,55%

Sumber: SPI Maret 2019

Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



Sumber: SPI Maret 2019

2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terdapat penurunan NPL pada kategori kredit produktif (Kredit Modal Kerja [KMK] dan Kredit Investasi [KI]) sementara NPL kredit konsumsi (KK) sedikit meningkat. NPL KMK dan KI masing-masing turun menjadi 3,09% dan 2,35% dari 3,34% dan 2,88% sedangkan NPL KK naik menjadi 1,71% dari 1,69% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan NPL KMK dan KI didorong oleh turunnya NPL pada sektor transportasi dan pertambangan khususnya tambang

batubara dan bahan galian. Selain itu, turunnya NPL sektor produktif juga diiringi oleh naiknya pertumbuhan KMK dan KI dibandingkan tahun sebelumnya.

KMK dan KI masing-masing tumbuh sebesar 12,05% (yoy) dan 13,57% (yoy) atau lebih tinggi dari 8,82% (yoy) dan 4,86% (yoy) pada tahun sebelumnya, sedangkan untuk KK melambat dari 11,50% (yoy) menjadi 9,00% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya penyaluran kredit produktif terkait dengan semakin maraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan

oleh pemerintah yang didukung dengan komitmen perbankan untuk memberikan pembiayaan baik secara individu maupun kerjasama sindikasi dengan lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, perbaikan KMK salah satunya adalah terkait dengan meningkatnya aktivitas produksi perusahaan untuk memenuhi kenaikan permintaan masyarakat menjelang Pemilu dan Ramadhan-Lebaran 2019. Di lain sisi, melambatnya pertumbuhan KK dipengaruhi oleh perlambatan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Kepemilikan Apartemen/Flat (KPA), dan Kredit Multiguna. Berdasarkan kelompok bank, kredit produktif terbesar disalurkan oleh bank BUMN dan BUSN Devisa dengan risiko kredit yang menurun. NPL KMK dan KI BUMN tercatat masing-masing sebesar 3,30% dan 1,92% menurun dari 3,71% dan

2,30% pada tahun sebelumnya. Adapun NPL KMK dan KI bank BUSN Devisa tercatat masing-masing sebesar 2,81% dan 2,80% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,10% dan 3,24%.

Sementara itu, NPL KMK dan KI pada kelompok BPD relatif cukup tinggi, masing-masing sebesar 8,49% dan 5,43%, meskipun membaik dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 9,35% dan 8,08%. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta *skills* dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK BPD sebesar 1,10% atau terendah dibandingkan kelompok bank lainnya.

Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Mar '18	Des '18	Mar '19	yoy	
				Mar '18	Mar '19
KMK	2.185	2.512	2.448	8,82%	12,05%
KI	1.194	1.309	1.356	4,86%	13,57%
KK	1.365	1.474	1.487	11,50%	9,00%
Total Kredit	4.743	5.295	5.291	8,54%	11,55%

Sumber: SPI Maret 2019

Tabel 24 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Mar '18	Des '18	Mar '19	yoy	
				Mar '18	Mar '19
NPL KMK	3,34	2,82	3,09	-36	-26
NPL KI	2,88	2,43	2,35	-48	-52
NPL KK	1,69	1,54	1,71	2	2
Total NPL	2,75	2,37	2,51	-29	-24

Tabel 25 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
BUMN	954.620	42,86	3,30	612.747	27,51	1,92	660.024	29,63	1,59
BUSN Devisa	1.078.244	50,62	2,81	574.589	26,97	2,80	477.261	22,41	2,11
BUSN Non Devisa	43.698	62,81	3,34	12.236	17,59	2,86	13.641	19,61	3,23
BPD	78.785	18,68	8,49	47.159	11,18	5,43	295.760	70,13	1,10
Campuran	132.015	66,42	2,23	41.462	20,86	1,47	25.294	12,73	2,68
KCBA	160.874	66,01	1,73	67.316	27,62	0,77	15.504	6,36	2,92
TOTAL	2.448.237	46,27	3,09	1.355.509	25,62	2,35	1.487.484	28,11	1,71

Sumber: SPI Maret 2019

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

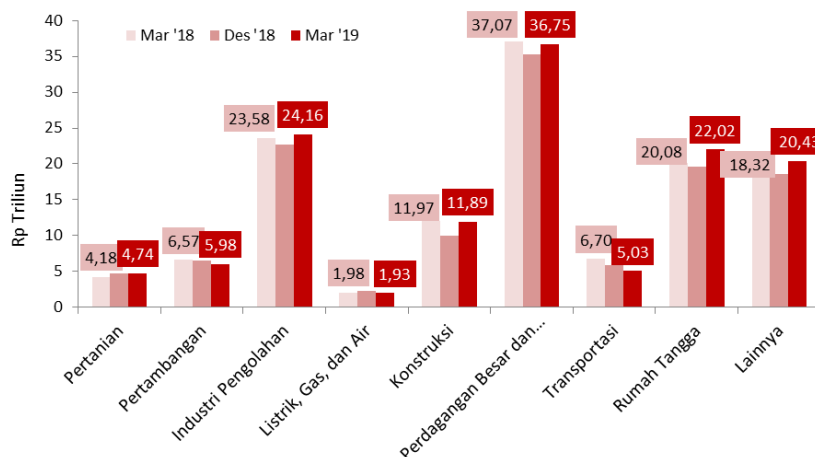
Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan nominal NPL terbesar terdapat pada sektor transportasi dan komunikasi yaitu sebesar Rp1,67T (yoy). Penurunan utamanya terdapat pada subsektor angkutan laut domestik dan angkutan jalan masing-masing sebesar Rp1,21T dan Rp672,75M. Hal tersebut sejalan dengan realisasi pembangunan infrastruktur jalan, bandara, dan pelabuhan serta meningkatnya penyaluran kredit transportasi dan komunikasi sebesar Rp548T atau tumbuh signifikan mencapai 11,55% (yoy) dari 8,54% (yoy) pada tahun lalu. Naiknya pertumbuhan kredit tersebut turut mendorong perbaikan rasio NPL *gross* sektor transportasi dan komunikasi yang turun menjadi 2,35% dari 3,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, perbaikan NPL juga terdapat pada sektor pertambangan dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp596M (yoy). Penurunan tersebut utamanya didorong oleh subsektor pertambangan batubara dan penggalan batu-batuan sejalan dengan kenaikan realisasi ekspor pertambangan yang cukup signifikan sebesar 31,08% (mtm)

atau menjadi USD2,36M pada Maret 2019. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sektor pertambangan sebesar 1,95% per Maret 2019. Di samping itu, kredit pertambangan juga tumbuh signifikan sebesar 31,50% (yoy) setelah terkontraksi 16,06% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penyaluran kredit pertambangan tersebut turut mendorong perbaikan NPL *gross* sebesar 4,34% atau turun dari tahun lalu sebesar 6,27%.

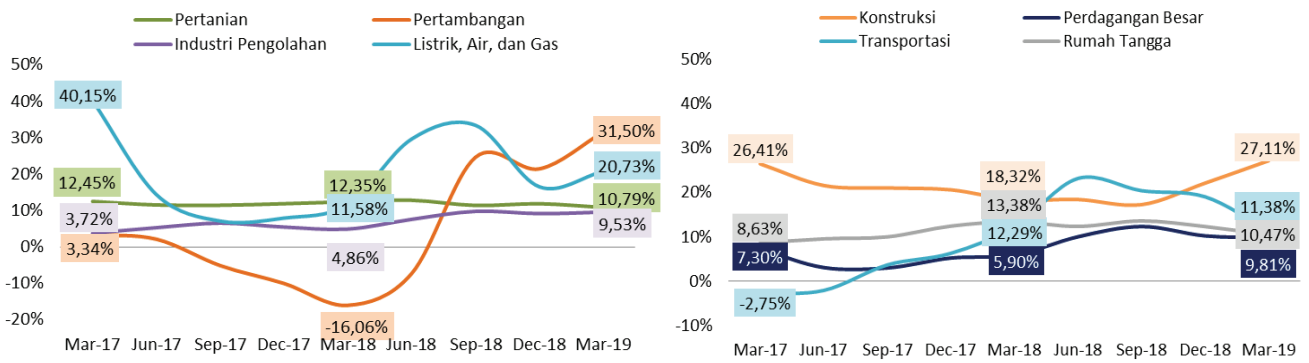
Sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami perbaikan dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp317M (yoy). Penurunan NPL terbesar terdapat pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya penjualan ritel pada Maret 2019 serta meningkatnya penjualan komoditas tembakau sebagai bahan baku lokal dari industri rokok di dalam negeri. Hal tersebut mendorong turunnya rasio NPL *gross* sektor perdagangan besar dan eceran yang semula sebesar 4,18% menjadi 3,78% pada periode laporan.

Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi



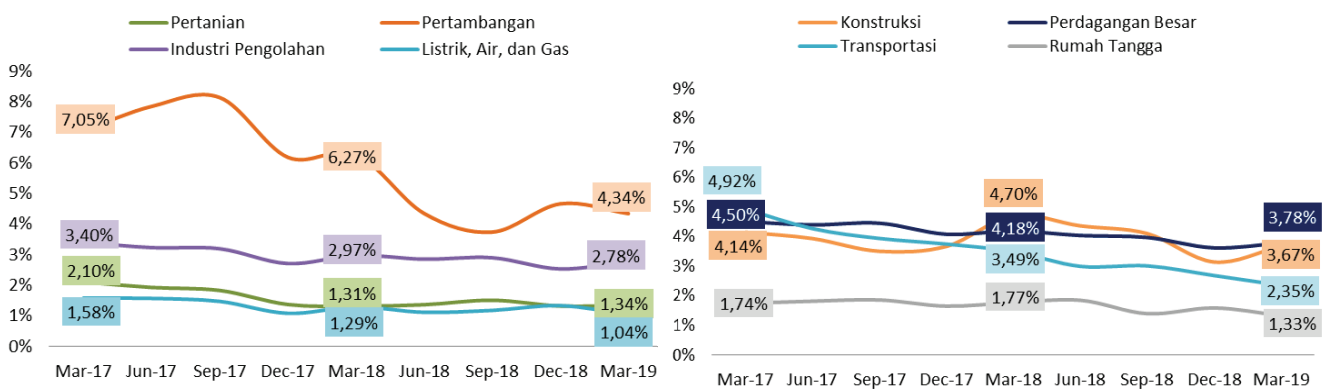
Sumber: SPI Maret 2019

Grafik 26 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2019

Grafik 27 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2019

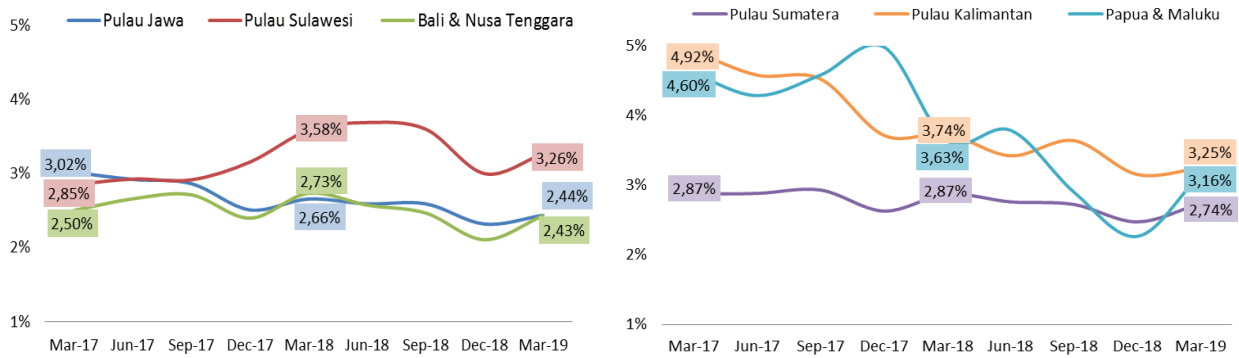
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Secara umum, NPL di setiap wilayah di Indonesia menunjukkan perbaikan dengan penurunan rasio NPL tertinggi terdapat pada wilayah Papua dan Maluku serta Kalimantan. Rasio NPL pada kedua wilayah tersebut masing-masing turun sebesar 47 bps (yoy) dan 49 bps (yoy) menjadi 3,16% dan 3,25%.

Perbaikan NPL di wilayah Papua dan Maluku utamanya terdapat pada sektor konstruksi dengan penurunan rasio NPL sebesar 180 bps (yoy) yaitu dari 10,32% menjadi 8,52%. Meski demikian, hal tersebut tetap perlu diwaspadai mengingat rasio NPL sektor konstruksi masih sangat tinggi yaitu berada di atas 5%. Adapun perbaikan NPL pada

wilayah Papua dan Maluku antara lain disebabkan oleh akselerasi penyelesaian proyek-proyek infrastruktur utamanya di wilayah Papua Barat. Beberapa proyek di Papua Barat yang turut menopang pertumbuhan konstruksi antara lain pembangunan kawasan ekonomi Sorong, pengerjaan Kilang Train III tangguh LNG, dan pengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Sementara itu, perbaikan NPL di wilayah Kalimantan utamanya terdapat di Kalimantan Timur pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan penurunan NPL dari tahun sebelumnya sebesar 30,18% menjadi sebesar 2,94% (Maret 2019). Hal ini antara lain dipengaruhi oleh tumbuhnya sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Maret 2019

Tabel 26 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,23%	4,45%	2,89%	0,85%	2,73%	3,59%	2,20%	1,74%	2,44%
Sumatera	1,62%	2,36%	2,58%	4,44%	7,93%	4,60%	3,07%	1,46%	2,74%
Kalimantan	0,67%	20,85%	1,34%	13,76%	9,26%	4,36%	3,71%	2,00%	3,25%
Sulawesi	1,61%	1,81%	2,64%	0,95%	15,92%	4,30%	4,59%	1,99%	3,26%
Bali & Nusa Tenggara	4,02%	0,01%	2,70%	0,48%	5,79%	3,73%	5,19%	1,22%	2,43%
Papua & Maluku	3,58%	7,59%	3,95%	3,25%	8,52%	2,92%	3,04%	1,66%	3,16%
Total	1,35%	4,68%	2,84%	0,96%	3,66%	3,80%	2,38%	1,71%	2,51%

Sumber: SPI Maret 2019, diolah

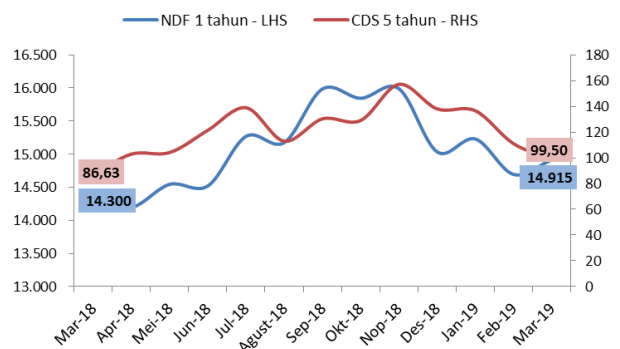
3. Risiko Pasar

Seiring dengan perkembangan pasar keuangan global yang mulai membaik, tekanan pada pasar keuangan domestik mulai mereda. Hal ini ditandai oleh mulai stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap USD serta pasar saham dan SBN yang mencatatkan kinerja positif (*net buy*) pada triwulan berjalan. Pada perbankan, kondisi tersebut ikut menurunkan risiko pasar yang tercermin pada terjaganya PDN pada level rendah serta potensi keuntungan bank dari kenaikan nilai wajar portofolio SBN yang dimiliki.

Ekspektasi risiko pasar ke depan juga menurun yang tercermin dari penurunan *Credit Default Swap* (CDS) dan *Non Deliverable Forward* (NDF) pada triwulan I-2019. Hal tersebut mengindikasikan

membairnya sentimen pasar terhadap pasar keuangan Indonesia.

Grafik 29 Tren CDS dan NDF Indonesia



Sumber: Reuters

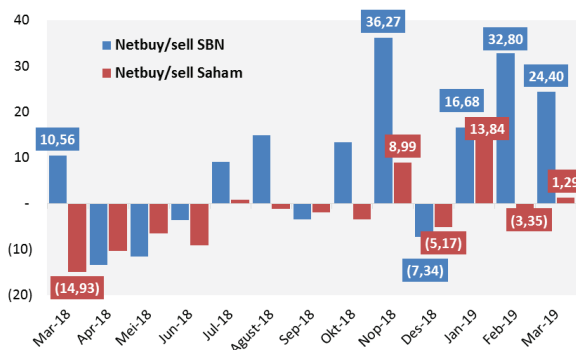
3.1 Risiko Nilai Tukar

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap USD masih terdepresiasi sebesar 3,55%. Namun demikian, pada kuartar pertama 2019 nilai tukar Rupiah mulai stabil

atau menguat sebesar 1,64% (qto) pada level Rp14.244/USD. Penguatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh masuknya aliran dana asing (*capital inflow*) ke Indonesia sebagai dampak dari kebijakan AS yang cenderung *dovish*. *Capital inflow* terekam dari transaksi *net buy* investor asing di pasar Saham dan SBN selama triwulan I-2019 masing-masing sebesar Rp11,78 triliun dan Rp73,87 triliun sehingga ikut mendorong kenaikan cadangan devisa menjadi Rp124,5 miliar pada Maret 2019 (Desember 2018=Rp120,7 miliar). Masuknya aliran asing ke pasar SBN juga tercermin pada naiknya porsi kepemilikan non residen pada SBN dari Desember 2018 sebesar 37,71% menjadi 38,26%.

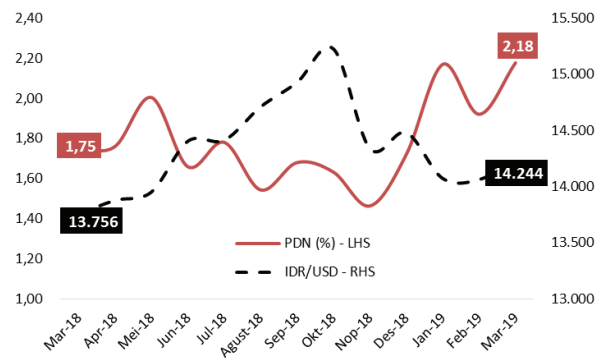
Pada neraca perbankan, rasio PDN meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 2,18%, namun demikian masih terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 20% yang menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank yang relatif rendah. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank (49 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 30 Net Buy (Sell) Transaksi Saham dan SBN Indonesia



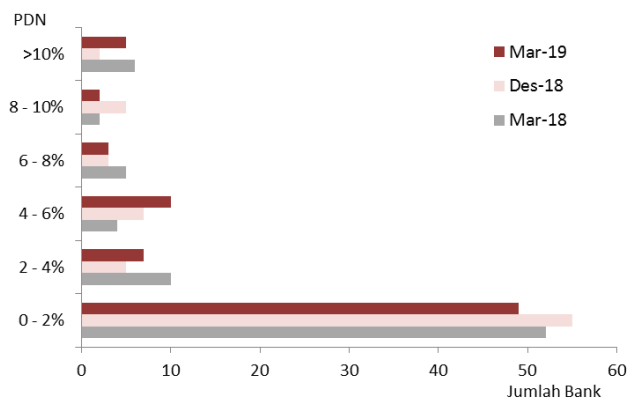
Sumber: DJPPR dan BEI

Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: SIP OJK dan Reuters

Grafik 32 Jumlah Bank Terhadap Range PDN

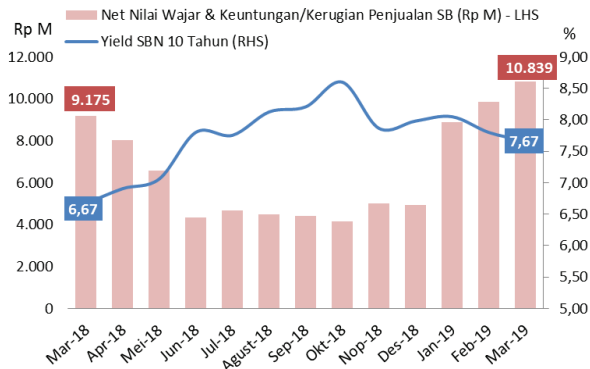


Sumber: SIP OJK

3.2 Risiko Suku Bunga

Sebagai pengaruh dari masuknya *capital inflow* ke pasar keuangan domestik, risiko suku bunga pada neraca perbankan juga menurun ditunjukkan oleh mulai naiknya nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank sejak awal tahun seiring dengan turunnya *yield* surat berharga. Pada Maret 2019, *yield* SBN tenor 10 tahun turun 32 bps (qto) menjadi 7,67%. Penurunan ini membuat nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank meningkat dari posisi Desember sebesar Rp4.936 miliar menjadi Rp10.839 miliar. Sehingga selama triwulan I-2019 terdapat potensi keuntungan bank sebesar Rp5.903 miliar dari portofolio *trading book*.

Grafik 33 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga

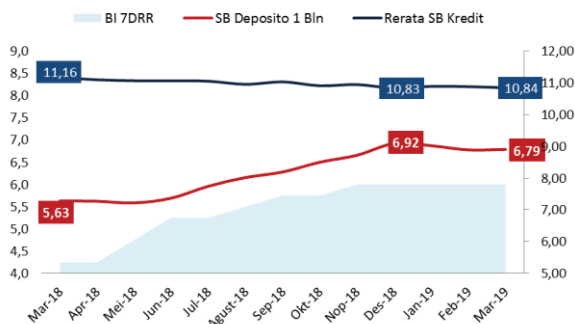


Sumber: SPI Maret 2019

Sementara itu, dalam satu tahun terakhir seiring dengan naiknya BI7DRR (175 bps) risiko suku bunga pada portofolio *banking book* berpotensi menurunkan pendapatan bank dikarenakan menyempitnya *gap* antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito sehingga berdampak pada turunnya NIM. Namun demikian, pada triwulan I-2019, seiring dengan perlambatan ekonomi global dan BI *rate* yang relatif stabil, *gap* suku bunga mulai melebar karena bank cenderung menyesuaikan suku bunga DPK lebih cepat dibandingkan dengan suku bunga kredit.

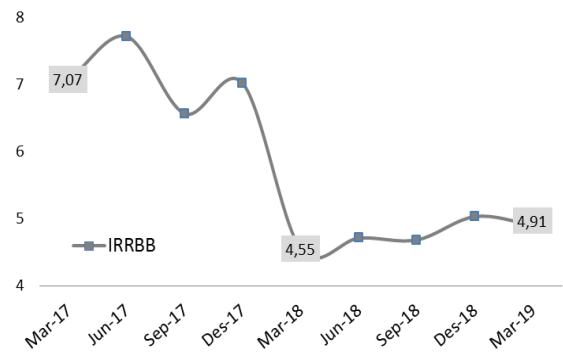
Risiko suku bunga tersebut tercermin pada *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang meningkat secara tahunan namun mulai menurun secara triwulan menjadi sebesar 4,91%.

Grafik 34 Gap Suku Bunga Kredit dan Deposito



Sumber: SIP Maret 2019

Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB



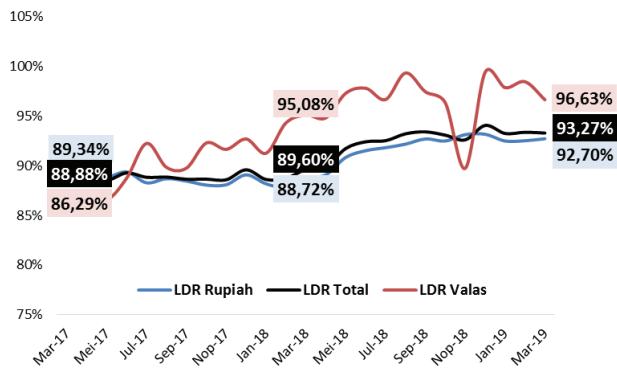
Sumber: SIP Maret 2019

4. Risiko Likuiditas

Pada triwulan berjalan, risiko likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai. Hal tersebut tercermin dari LDR yang meskipun masih tinggi namun mulai menurun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Selain itu, terjaganya likuiditas perbankan juga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100% serta suku bunga PUAB yang relatif stabil selama periode laporan.

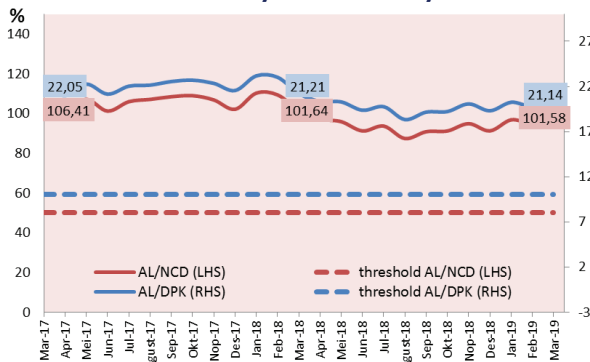
Pada Maret 2019, LDR perbankan naik menjadi 93,27% lebih tinggi dibandingkan 89,61% pada Maret 2018. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit (*lending*) yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan DPK (*funding*). Namun demikian, LDR tersebut sudah lebih baik dibandingkan posisi Desember 2018 sebesar 94,04% yang mengindikasikan mulai turunnya tekanan terhadap likuiditas bank. Berdasarkan denominasi mata uang, LDR rupiah dan LDR valas masing-masing tercatat sebesar 92,70% dan 96,63% meningkat dibandingkan 88,72% dan 95,08% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 36 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: SPI

Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: OJK, diolah

Indikator AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga karena jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 101,58% dan 21,14%. Dibandingkan tahun lalu, rasio tersebut sedikit menurun seiring dengan pertumbuhan *lending* yang cepat dari *funding*-nya. Namun demikian, sejak awal tahun likuiditas bank mulai meningkat seiring dengan meningkatnya aset likuid bank utamanya dalam bentuk surat berharga. Hal ini juga tercermin dari naiknya rasio aset likuid terhadap total aset dari triwulan sebelumnya sebesar 14,96% menjadi 16,00%.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

perbankan yang berada di atas 100% yaitu sebesar 195,72% serta tidak ada bank dengan LCR di bawah 100%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, LCR meningkat seiring dengan naiknya *High Quality Liquid Assets* (HQLA) dibarengi turunnya proyeksi *Net Cash Outflow* (NCO) dalam 30 hari ke depan. Kelompok KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 231,27%, utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Mar-18	Des-18	Mar-19
BUKU 3	163,19	167,00	166,43
BUKU 4	805,40	781,17	764,28
KCBA	72,88	85,05	86,15
Asing non KCBA	298,27	272,94	313,79
Total HQLA	1339,74	1306,17	1330,67

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Mar-18	Des-18	Mar-19
BUKU 3	100,47	116,75	117,67
BUKU 4	362,73	385,59	374,02
KCBA	26,70	36,13	37,25
Asing non KCBA	153,23	147,85	150,96
Total NCO	643,14	686,32	679,90

Kelompok	LCR (%)		
	Mar-18	Des-18	Mar-19
BUKU 3	162,43%	143,04%	141,44%
BUKU 4	222,04%	202,59%	204,35%
KCBA	272,92%	235,42%	231,27%
Asing non KCBA	194,65%	184,61%	207,87%
LCR Total	208,31%	190,32%	195,72%

Sumber: OJK

Kondisi likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga tercatat cukup aktif dengan volume transaksi dan suku bunga yang relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Volume transaksi PUAB pada triwulan I-2019 tercatat sebesar Rp1.180 dengan rerata tertimbang suku bunga PUAB sebesar 5,99%. Dibandingkan dengan tahun

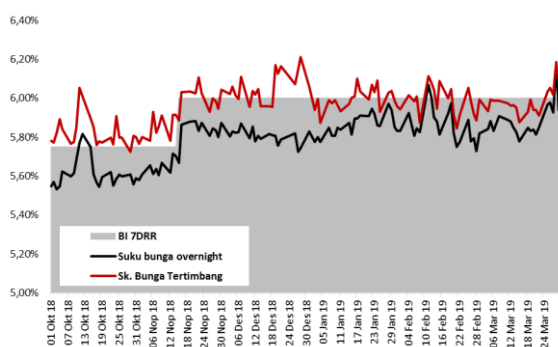
sebelumnya, suku bunga PUAB meningkat menyesuaikan dengan kenaikan pada suku bunga acuan (BI7DRR).

Tabel 28 Rekapitulasi Transaksi PUAB

PUAB	Industri		
	TW I'18	TW IV'18	TW I'19
Nilai Transaksi (Rp T)	1.007,38	1.198,51	1.180,35
SB. Rerata Tertimbang	4,03%	5,92%	5,99%

Sumber: LHBU

Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBU

5. Tata Kelola Perbankan

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

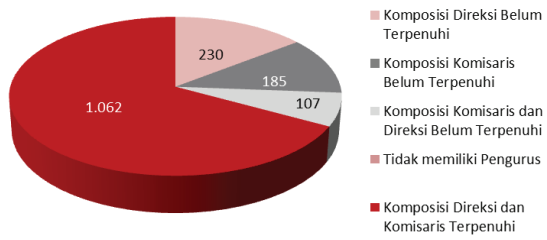
Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian

tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan. Dengan demikian, pada triwulan ini tata kelola yang akan dibahas hanya tata kelola BPR.

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam penerapan *corporate governance*. Salah satu pertimbangan adalah bahwa semakin besar modal inti dan total aset maka semakin tinggi pula risiko BPR karena memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal tersebut berdampak pada kompleksitas risiko yang dihadapi BPR sehingga membutuhkan praktik tata kelola yang baik/GCG yang lebih memadai.


Pada triwulan I-2019, terdapat 67,05% atau sebanyak 1.062 BPR yang sudah memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang jauh berada di *remote area*, relatif kurang menariknya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan



Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Pada periode laporan, OJK menerbitkan tiga ketentuan perbankan terkait penguatan kelembagaan bank mengenai penerapan fungsi audit intern, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko serta menerbitkan Pedoman Pengawasan berdasarkan risiko mengenai transaksi perbankan yang terkait dengan APU dan PPT. Selain itu, OJK juga menginisiasi peluncuran aplikasi OJK-BOX untuk memudahkan arus informasi transaksional perbankan kepada pengawas OJK.

1. Pengaturan Perbankan

1.1 Bank Umum

Pada triwulan I-2019, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait penguatan kelembagaan bank umum, yaitu:

1. POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
Peraturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penerapan fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam PBI No.1/6/PBI/1999 dalam rangka mengakomodir perkembangan praktik tata kelola dan *best practice* fungsi audit intern yang diterbitkan oleh *The Basel Committee on Banking Supervision* serta standar praktik profesional audit internal yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors*.
2. POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.
Peraturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan ketentuan PBI 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset

Bagi Bank Umum agar sesuai dengan standar Basel 3.

1.2 BPR

Pada triwulan I-2019, OJK menerbitkan satu ketentuan BPR, yaitu SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan ini diterbitkan untuk memberikan standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR sebagai acuan minimum dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

2. Pengembangan Pengawasan Perbankan

2.1 Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan I-2019, mencakup antara lain:

1. Perumusan *tools* pengawasan berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi OJK-BOX dan *Condensed Report* guna memberikan gambaran kondisi bank secara lebih dini kepada pengawas;
2. Penyusunan Standar Prosedur Operasional Pengawasan berdasarkan

Risiko khususnya terkait pengembangan *tools* pengawasan berbasis TI untuk mendukung serta memperlengkap proses pengawasan bank.

Selain itu, OJK juga memperkuat metode pengawasan bank umum terkait APU dan PPT dalam rangka menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) yang akan dilaksanakan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) atas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia.

2.2 BPR

Pada triwulan I-2019, kegiatan pengembangan pengawasan BPR dan/atau BPRS yang telah dilakukan yaitu meliputi:

1. Finalisasi penyusunan Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT Berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS. Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan kertas kerja penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta memberikan acuan bagi Pengawas BPR dan BPRS dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko.
2. Penyusunan bahan *user requirement* pengembangan Sistem Informasi Pengawasan BPR (SIP BPR) untuk modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko. Bahan *user requirement* ini merupakan dasar dalam pengembangan sistem aplikasi

SIP BPR modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko.


3. Penyusunan dan pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan BPR. SPO dimaksud ditujukan untuk dapat menjadi petunjuk teknis bagi Pengawas BPR. Proses penyusunan dan pengkinian SPO akan dilakukan secara bertahap. Untuk penyusunan SPO tahun 2019 antara lain mencakup:
 - a. SPO terkait Ketentuan Laporan Bulanan BPR, Laporan Publikasi BPR, Laporan Tahunan BPR;
 - b. SPO terkait Rencana Bisnis BPR; dan
 - c. SPO terkait Tata Kelola BPR.

2.3 Perbankan Syariah

Pada triwulan I-2019, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah dilakukan melalui:

1. Sosialisasi Struktur Dana dan Penyempurnaan Pedoman Laporan Bulanan BPRS kepada industri BPRS.
2. *Workshop* Penguatan Kompetensi Pengawas Bank Syariah *Batch I*.
3. Penyusunan *draft* SEDK Pedoman Pengawasan Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain itu, untuk menunjang sistem pelaporan dan pengawasan yang terotomasi, saat ini sedang dilakukan penyesuaian modul KPMM dan ATMR pada aplikasi SIMWAS BPRS dan proses *mapping* konversi data dari RBB format syariah ke RBB format konvensional.



Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan prudensial perbankan, OJK senantiasa memantau kepatuhan perbankan terhadap penerapan program APU/PPT dan memonitor ada tidaknya dugaan/kejadian Tipibank. Selain itu, OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Penegakan Kepatuhan Perbankan

1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tipibank (*fraudsters*) senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan I-2019, terdapat 19 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP)

yang terjadi pada 5 kantor bank (1 kantor BU dan 4 kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Pada periode yang sama terdapat 19 PKP pada 5 kantor bank (2 kantor BU dan 3 kantor BPR) yang masih dalam proses analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganannya serta 24 PKP pada 9 kantor bank (3 kantor BU, 6 kantor BPR) yang di investigasi dan/atau dalam proses pelimpahan.

Tabel 29 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2019					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	1	4	4	15	5	19
2. PKP dalam proses analisis *)	2	3	9	10	5	19
3. PKP yang diinvestigasi *)	3	6	6	18	9	24
a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *)	1	1	3	5	2	8
b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	2	5	3	13	7	16
4. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	0	8	0	24	8	24

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya
Sumber: OJK

Adapun rincian penanganan PKP yaitu 8 PKP pada 2 kantor bank (1 kantor BU, 1 kantor BPR) masih dalam proses pemeriksaan investigasi dan 16 PKP pada 7 kantor bank

(2 kantor BU, 5 kantor BPR) masih dalam proses pelimpahan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi, selama triwulan

I-2019, terdapat pelimpahan 24 PKP pada 8 kantor BPR kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK.

Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan I-2019 terdapat 24 kasus dugaan tipibank, diantaranya pada bidang perkreditan sebanyak 15 kasus, bidang pendanaan sebanyak 3 kasus, bidang penyalahgunaan aset sebanyak 5 kasus, dan bidang lainnya sebanyak 1 kasus. Pelaku dugaan tipibank tersebut didominasi oleh Pejabat Eksekutif sebanyak 7 orang, Direksi sebanyak 5 orang, dan Karyawan sebanyak 6 orang.

Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti *fraud*, pada triwulan I-2019 telah dilakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan dan mahasiswa di Semarang. Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan di dua tempat yaitu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (Untag).

1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan I-2019 terdapat 21 pemberian keterangan ahli dan 3 pemberian keterangan saksi. Sebanyak 21 Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan RI masing-masing sebanyak 11 dan 10 permintaan. Selain itu, terdapat 3 pemberian keterangan saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan yang berasal dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT

OJK, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, berkomitmen penuh untuk terus mendorong penguatan pengawasan APU PPT oleh OJK dan penguatan penerapan program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT berbasis risiko oleh PJK selama triwulan I-2019, sebagai berikut:

1. Sosialisasi Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) pada kegiatan Sosialisasi Data Pokok BPR/BPRS.

2. *Industrial testing* SIGAP tahap 2 dengan seluruh Asosiasi sektor jasa keuangan.
3. Pelaksanaan *Recycling* BPR/BPRS dengan materi Penerapan Program APU dan PPT Bagi BPR/BPRS.

Dalam rangka penguatan pengawasan program APU PPT berbasis risiko dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi program APU PPT dengan pemaparan mengenai *Risk-Based Approach* (RBA) *Tools* dan SIGAP.
2. Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Level 1.
3. Penyempurnaan *Risk-Based Supervisory Tools* APU PPT melalui *Technical Assistance* dengan *International Monetary Fund* (IMF).

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT sektor jasa keuangan, baik oleh OJK, PJK, dan juga masyarakat, dibutuhkan media informasi terkait program APU PPT yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan diseminasi informasi secara masif dan mudah diakses. Kehadiran *Minisite* APU PPT yang dapat diakses langsung pada halaman depan *website* OJK, bermanfaat dalam memberikan informasi terkait APU PPT kepada PJK dan masyarakat umum. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan penyempurnaan dan pengelolaan *Minisite* APU PPT yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi saat ini. Pada periode laporan telah dilaksanakan *soft launching* *Minisite* APU PPT dan informasi pengkinian *Minisite* APU PPT yang disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) *Kick-off Meeting* Persiapan MER FATF yang dihadiri oleh internal OJK dan PJK.

Memperhatikan bahwa dalam program APU PPT, PJK wajib melakukan pemblokiran terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan I-2019 tidak ada penetapan atas Daftar Proliferasi, namun terdapat tiga DTTOT sebagai berikut:

1. 4 WNA yang bersumber dari ISIL (*Daesh*) and *Al-Qaeda Sanction List* dan *Taliban List* dihapus dari DTTOT (DTTOT/P-1b/66/II/RES.6.1.2019);
2. 1 WNA yang bersumber dari pemerintah Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (DTTOT/P-1c/ 68 /III/RES.6.1./2019); dan
3. 1 entitas luar negeri yang bersumber dari Pemerintah Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (DTTOT Nomor: DTTOT/P-1d/71/III/RES.6.1./2019).

2. Kelembagaan Perbankan

Pada tahun 2019, OJK mengeluarkan kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu reformasi internal berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

2.1 Bank Umum

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan I-2019, telah diselesaikan 79 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status bank, perubahan nama bank, dan pembukaan kantor perwakilan bank luar negeri. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 38 perizinan dan perubahan status Kantor Cabang (KC) menjadi KCP sebanyak 14 perizinan.

Adapun persetujuan perubahan nama bank diberikan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk menjadi PT BANK BTPN, Tbk per 28 Januari 2019. PT BANK BTPN merupakan hasil merger antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI).

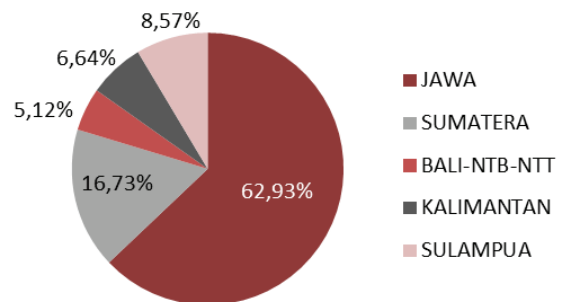
2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2019, jaringan kantor BUK bertambah 1.509 unit dari triwulan sebelumnya 138.063 jaringan kantor menjadi 139.572 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terdapat pada kas keliling/kas mobil/kas terapung yang bertambah 90 unit serta peningkatan pada Kantor Fungsional sebanyak 35 kantor.

Sementara itu, terdapat pengurangan pada Kantor Kas sebanyak 8 kantor yang antara lain berpindah status menjadi KCP. Dengan adanya peralihan tersebut disertai adanya perubahan status KC menjadi KCP, jumlah KCP selama triwulan I-2019 bertambah sebanyak 15 KCP dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 87.838 jaringan kantor (62,93%), diikuti pulau Sumatera 23.348 (16,73%), Sulampua 11.968 (8,57%), Kalimantan 9.266 (6,64%), dan Bali-NTB-NTT 7.152 (5,12%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa utamanya pada jaringan ATM/ADM dan kas keliling/kas mobil/kas terapung yang masing-masing bertambah 734 unit dan 68 unit.

Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: LKPBU

Tabel 30 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2018	2019
	TW IV	TW I
1 Kantor Pusat Operasional	48	48
2 Kantor Pusat Non Operasional	54	53
3 Kantor Cabang Bank Asing	9	9
4 Kantor Wilayah	174	173
5 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.877	2.888
6 Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	1
7 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	26	25
8 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.143	16.158
9 Kantor Kas	10.326	10.318
10 Kantor Fungsional	1.076	1.111
11 <i>Payment Point</i>	2.056	2.056
12 Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.330	1.420
13 Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *)	12	12
14 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	-	2
15 ATM/ADM	103.932	105.298
TOTAL	138.063	139.572

Sumber: OJK

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT *New Entry*)

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga) besaran kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik, pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan

SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK atau FPT *New Entry*) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan I-2019, dari 81 pemohon terdapat 34 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 32 calon yang lulus sebagai Dewan Komisaris dan Direksi BUK dan mendapatkan Surat Keputusan (SK), termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 permohonan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Tabel 31 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak ditindaklanjuti	TW I 2019
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
Dewan Komisaris	17	3	15	1	1	37
Direksi	17	5	17	2	3	44
Total	34	8	32	3	4	81

Sumber: OJK

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan I-2019, terdapat 10 permohonan perizinan produk baru dengan rincian 1 perizinan dinyatakan tidak disetujui dan 9 perizinan yang masih dalam proses penyelesaian. Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 32 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor dan pemindahan alamat kantor, dengan hasil 12 permohonan telah disetujui, 1 permohonan tidak disetujui dan 19 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Pada periode laporan, OJK juga menerima permohonan perizinan lainnya yaitu berupa 6 permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah, 3 permohonan izin usaha Bank Syariah, 4 permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah (konversi), 1 permohonan pemisahan (*spin-off*), dan 1 permohonan merger dan/atau akuisisi. Selanjutnya dari permohonan tersebut, 1 permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah telah disetujui, 1 permohonan prinsip dikembalikan karena tidak memenuhi syarat, dan 13 permohonan perizinan lainnya masih dalam proses penyelesaian.

2.2.2 Jaringan Kantor

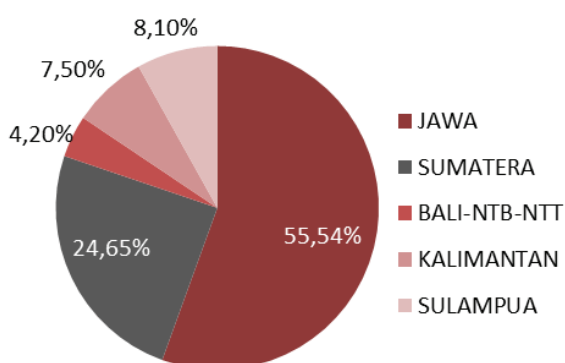
Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 99 jaringan kantor BUS menjadi 12.070 unit. Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat pada layanan syariah/*office channeling* dan *payment point* yang bertambah masing-masing 38 dan 34 unit. Peningkatan layanan syariah/*office channeling* tersebut masih merupakan salah satu upaya untuk mendorong perkembangan perbankan syariah dengan menempatkan Layanan Syariah Bank (LSB) atau *office channeling* pada bank induk, selain juga bertujuan untuk efisiensi biaya.

Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (55,54%, 6.692 kantor), diikuti Sumatera (24,65%, 2.970 kantor), Sulampua (8,10%, 976 kantor), Kalimantan (7,50%, 904 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,20%, 506 kantor). Hampir semua wilayah mengalami peningkatan jaringan kantor dengan peningkatan terbanyak di wilayah Jawa yaitu bertambah 50 unit, utamanya dalam bentuk layanan syariah/*office channeling* dan *payment point*. Sementara itu, terdapat penurunan jaringan kantor di wilayah Bali-NTB-NTT masing-masing satu unit berupa kantor cabang, layanan ATM/ADM, dan *office channeling*.

Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2018				2019
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
Kantor Pusat Bank Umum	13	13	14	14	14
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	604	603	612	616	618
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	1.323	1.326	1.335	1.348	1.364
Kantor Kas	232	239	243	253	256
Unit Usaha	21	21	22	22	22
Payment Point	2.359	2.436	2.487	2.540	2.574
Kas keliling/kas mobil/kas terapung	174	176	174	179	183
ATM/ADM	2.720	2.779	2.944	2.969	2.971
Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional)	3.377	3.366	3.368	4.030	4.068
TOTAL	10.823	10.959	11.199	11.971	12.070

Sumber: OJK

Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS

Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Selama triwulan I-2019, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan *New Entry* terhadap 35 calon pengurus bank syariah dan 11 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu terdapat 8 calon pengurus bank dan 6 calon DPS yang dinyatakan memenuhi syarat (disetujui).

Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Syariah

Subjek	Disetujui	Ditolak/Belum		Total Permohonan
		Memenuhi Syarat	Proses	
Pengurus Bank	8	18	9	35
DPS	6	2	3	11
Total	14	20	12	46

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2019, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 3 proses Merger, yaitu pada:
 - i. PT BPR Dhana Sewu ke dalam PT BPR Langgenglestari Bersama.
 - ii. PT BPR Phidectama Sentani ke dalam PT BPR Phidectama Abepura.
 - iii. PT BPR Bumibekasi Artha ke dalam PT BPR Karyajatnika Sadaya; dan

- b) Pencabutan Izin Usaha dilakukan kepada PT BPR Pancadana dan PT BPR Artha Panggung Perkasa.

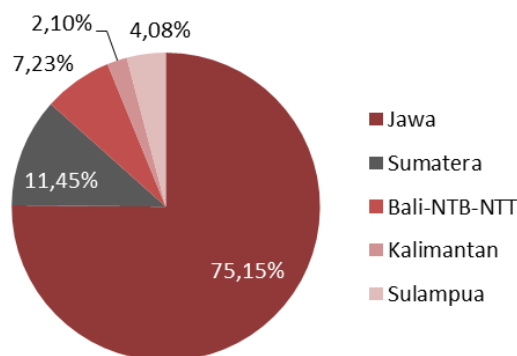
2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2019, terdapat 1.593 BPR dengan 14.912 jaringan kantor. Dari 14.912 jaringan kantor tersebut, 6.297 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 4 BPR, sementara kantor BPR bertambah sebanyak 24 kantor.

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 75,15% (4.732

kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 11,45% (721 kantor). Penurunan 4 BPR tersebut sebagian besar terdapat di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, peningkatan kantor BPR sebagian besar terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Grafik 42 Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

Tabel 34 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2018		2019
	TW I	TW IV	TW I
- Kantor Pusat (KP)	1.615	1.597	1.593
- Kantor Cabang (KC)	1.651	1.682	1.700
- Kantor Kas (KK)	2.960	2.994	3.004
- ATM	228	226	177
- <i>Payment Point</i>	8.832	8.846	8.438
TOTAL	15.286	15.345	14.912

Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (FPT New Entry)

Pada triwulan I-2019, dilakukan FPT *New Entry* kepada 400 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 318 calon (79,50% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 82 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon FPT	TW I 2019		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Direksi	156	56	212
Komisaris	130	23	153
PSP	32	3	35
Jumlah	318	82	400

Sumber: OJK

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam implementasi dan penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Pada tanggal 22 April 2019, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Dalam rapat tersebut, KSSK menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama triwulan-I 2019 kondisi SSK terjaga dengan baik. Kondisi SSK yang terjaga tersebut turut dipengaruhi pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman, tertib, dan damai.

KSSK mencermati beberapa potensi risiko, khususnya yang berasal dari perekonomian global, yaitu pelemahan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia akibat perang dagang, sebagaimana menjadi perhatian dalam *Spring Meetings* 2019 International Monetary Fund – World Bank. Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan memacu

investasi dan ekspor dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Merespon hal tersebut, KSSK akan terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial dan penjaminan simpanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Di bidang moneter, kebijakan difokuskan pada suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional, khususnya guna mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Selama triwulan-I 2019, BI mempertahankan suku bunga acuan (BI7DRR) sebesar 6.00%. Bersamaan dengan itu, BI juga menempuh berbagai kebijakan yang akomodatif untuk mendorong permintaan antara lain melalui: (i) strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas di pasar melalui transaksi *term-repo* secara reguler dan terjadwal, disamping *FX Swap*; (ii) memperkuat kebijakan makroprudensial dengan menaikkan kisaran batas Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) menjadi 84%-94%;

(iii) mengakselerasi pendalaman pasar keuangan melalui penguatan *market conduct* dan penerbitan ketentuan pelaksanaan instrumen derivatif suku bunga Rupiah; (iv) memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan memperluas elektronifikasi penyaluran bansos, transportasi, dan keuangan pemerintah daerah dan mempersiapkan QR *Indonesia Standard* (QRIS) sebagai standar QR *code payment* di Indonesia untuk memperluas interkoneksi dalam mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital.

Di bidang fiskal, kinerja APBN secara umum menunjukkan tren positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara, yang akan mendukung pencapaian target pembangunan 2019. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan keuangan negara secara pruden dan transparan. Dengan APBN yang kredibel, diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang cenderung mengalami perlambatan.

OJK memandang bahwa SSK masih terjaga dengan baik yang didukung oleh tingkat permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memadai. Kinerja intermediasi LJK juga tumbuh positif dengan tingkat risiko yang *manageable*. OJK mendukung peran aktif Sektor Jasa Keuangan (SJK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan memperluas pendalaman pasar, meningkatkan kapasitas pelaku di industri keuangan, dan

mengembangkan program pembiayaan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai tren kenaikan suku bunga simpanan secara umum sudah melandai dan stabil, sejalan dengan membaiknya kondisi likuiditas perbankan. Selanjutnya LPS juga melakukan pemantauan *coverage* penjaminan baik nominal dan rekening di mana data terakhir dinilai masih memadai untuk mendukung kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan.

Menyambut bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, KSSK membangun sinergi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan uang tunai masyarakat, lancarnya transaksi sistem pembayaran, serta layanan jasa keuangan lainnya.

1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan I-2019, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi yaitu:

- a. Penyusunan Nota Kesepahaman OJK-BI-LPS tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan;
- b. Penerbitan POJK dan SEOJK Laporan Bulanan BPR;
- c. Pembahasan rencana implementasi program BPD *One*;
- d. Penyusunan *Blueprint* Integrasi Pelaporan;

- e. Pembahasan tindak lanjut penyelesaian bunga pinjaman *Sub Ordinated Loan*;
- f. Pembahasan kredit terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah;
- g. Pembahasan pencapaian rasio kredit/pembiayaan UMKM tahun 2018;
- h. Diskusi hasil asesmen pembiayaan perekonomian melalui Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar Modal;
- i. Pembahasan terkait LPEI sebagai Bank Devisa;
- j. *Knowledge-sharing National Balance Sheet*;
- k. Pembahasan rencana pencabutan izin usaha KCBA HSBC;
- l. *Knowledge-sharing* bisnis model dan kerangka pengawasan IKNB oleh OJK dan hasil asesmen industri IKNB oleh BI;
- m. Pembahasan pengenaan sanksi oleh BI terhadap salah satu bank terkait implementasi Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) pada kartu ATM dan/atau kartu Debet; dan
- n. Pembahasan antara OJK-BI-LPS mengenai kerahasiaan informasi dalam metadata Integrasi Pelaporan.

Dalam rangka implementasi Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK, pada triwulan I-2019 telah dilaksanakan *Deputies Meeting* BI-OJK antara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK dengan Anggota Dewan Gubernur BI dan juga *High Level Meeting* BI-OJK antara Ketua Dewan Komisiner OJK dengan Gubernur BI yang membahas beberapa hal yang bersifat prinsipil dan strategis.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI pada triwulan I-2019 meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Pemutakhiran daftar Bank Sistemik;
- c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- d. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sesuai dengan amanat UU PPKSK, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 28 Januari 2019, yaitu:

- a. Pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap Bank;
- b. Tindak lanjut pengawasan dan analisis Bank;
- c. Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan status BDPI dan BDPK;
- d. Penanganan Bank Sistemik dengan status BDPI dan BDPK;
- e. Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan;
- f. Penanganan Bank Sistemik yang diserahkan oleh KSSK kepada LPS;
- g. Tindak lanjut penyelesaian Bank yang dicabut izin usahanya;
- h. Pendirian dan pengakhiran Bank Perantara;
- i. Penanganan atau penyelesaian Bank dengan status "Tbk" dan penerbitan surat berharga; dan

j. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2019 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS dalam rangka penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS termasuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pertukaran informasi dan/atau data yang merupakan salah satu amanat NK OJK-LPS.

Lebih lanjut, dalam rangka Integrasi Pelaporan di sektor Perbankan, telah diadakan beberapa koordinasi antara OJK-BI-LPS terkait penyusunan NK OJK-BI-LPS tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan yang akan ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK bersama dengan Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner LPS.

2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

2.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pada tanggal 19 Februari 2019, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Kepala PPATK telah menandatangani Nota Kesepahaman yang merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman sebelumnya tanggal 18 Juni 2013. Kerjasama antara OJK dengan PPATK merupakan bentuk sinergi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus upaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

Kerjasama OJK dengan PPATK telah berjalan dengan sangat baik dan intensif khususnya dalam ruang lingkup

pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum, koordinasi pemeriksaan, penelitian dan riset, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, hingga pengembangan sistem teknologi informasi.

Selanjutnya, kerjasama antara OJK dengan PPATK diharapkan dapat mendukung tujuan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh pada *Financial Action Task Force (FATF)* antara lain melalui keberhasilan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* oleh FATF tahun 2019/2020.

Selama triwulan-I 2019, berbagai kegiatan koordinasi dan kerjasama telah dilakukan antara OJK dengan PPATK yang mencakup topik-topik sebagai berikut:

- a. Pembahasan tindak lanjut *joint* audit tahun 2018 dan rencana *joint* audit tahun 2019;
- b. Pengkinian *National Risk Assessment (NRA)* TPPU/TPPT dan *Sectoral Risk Assessment (SRA)* TPPU/TPPT sektor jasa keuangan;
- c. Implementasi aplikasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT);
- d. Pelaksanaan *workshop* pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko bagi sektor jasa keuangan;
- e. Pembahasan Rencana Aksi tahun 2019 untuk pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Tahun 2017-2019; dan
- f. Pembahasan rekomendasi kebijakan penetapan penyelenggara teknologi finansial (*financial technology/FinTech*)

sebagai pihak pelapor dalam rezim APU PPT di Indonesia.

2.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya

OJK secara aktif melakukan kerjasama sebagai bentuk sinergi dengan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan atau lembaga terkait lainnya. Kerjasama yang dilakukan utamanya terkait penyelenggaraan *capacity building*, baik bagi para pengawas sektor jasa keuangan dan pelaku industri jasa keuangan guna meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Selama triwulan-I 2019, kegiatan *capacity building* yang diselenggarakan oleh OJK bersinergi

dengan asosiasi sektor jasa keuangan atau lembaga terkait lainnya, sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi sebagai pengajar dalam kegiatan Pelatihan ke-1 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
- b. OJK bersama dengan PPATK dan tim ahli APU PPT di industri jasa keuangan menyelenggarakan kegiatan *Workshop* Pendampingan APU PPT Berbasis Risiko bagi Sektor Jasa Keuangan.
- c. OJK sebagai narasumber *dalam Expert Gym* yang diadakan oleh Asosiasi FinTech Indonesia "Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme: Ancaman bagi Perkembangan Industri FinTech".

Halaman ini sengaja dikosongkan

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

Dalam rangka mempersiapkan MER FATF pada September 2019 mendatang, OJK menyiapkan *Priority Actions Plan* untuk memenuhi defisiensi dan rekomendasi hasil penilaian MER APG sebelumnya. Selain itu, OJK juga berkoordinasi secara berkelanjutan dengan IJK dan pengawas serta menyusun konsep TC untuk pemenuhan kecukupan pengaturan program APU PPT dengan standar FATF.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK selaku lembaga pengatur dan pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan I-2019, asesmen internasional terkait SJKI yang dilaksanakan adalah *Mutual Evaluation Review* (MER).

Mutual Evaluation Review (MER)

Sesuai dengan hasil sidang *Financial Action Task Force* (FATF) *Plenary Meeting* pada bulan Oktober 2018, Indonesia akan memulai proses *Mutual Evaluation Review* (MER) FATF di bulan September 2019 yang merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui dalam rangka pengajuan proses keanggotaan Indonesia dalam FATF. MER FATF bertujuan untuk menentukan kesiapan Indonesia menjadi anggota penuh FATF melalui asesmen kesiapan perangkat peraturan otoritas lembaga sesuai dengan

rekomendasi FATF dan melalui evaluasi atas efektivitas penerapan perangkat peraturan dan otoritas lembaga dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar FATF.

Hasil MER Indonesia oleh *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) Tahun 2017/2018 dijadikan bekal awal dalam pelaksanaan MER FATF tahun 2019 – 2020. Adanya defisiensi dan rekomendasi yang telah teridentifikasi pada hasil MER APG dipenuhi melalui *Priority Actions Plan* OJK yang mencakup:

- (i) Penyempurnaan ketentuan APU PPT di sektor jasa keuangan;
- (ii) Peningkatan penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko di seluruh sektor jasa keuangan;
- (iii) Penguatan pengawasan APU PPT terhadap grup konglomerasi;
- (iv) Penerapan sanksi administratif secara tepat waktu yang lebih dissuasive jika tindakan lain tidak meningkatkan kepatuhan;
- (v) Peningkatan pemahaman risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT, serta penerapan APU PPT berbasis risiko kepada pelaku industri jasa keuangan;

- (vi) Peningkatan kerja sama terkait APU PPT di tingkat nasional dan internasional; dan
- (vii) Pengelolaan statistik APU PPT yang terintegrasi.

Keberhasilan MER Indonesia oleh FATF tahun 2019 membutuhkan keterlibatan aktif dari industri jasa keuangan dan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan. Koordinasi dan keterlibatan aktif antara OJK dengan industri dan asosiasi sektor jasa keuangan merupakan bagian penting dalam penilaian efektivitas implementasi penerapan program APU PPT dalam konteks *preventive measures*.

Untuk mendukung keberhasilan MER, pada triwulan I-2019, OJK telah melakukan rapat koordinasi persiapan MER secara berkelanjutan dengan industri jasa keuangan dan pengawas terkait yang diawali dengan *Focus Group Discussion* (FGD) "Persiapan MER Indonesia oleh FATF". Di samping itu, OJK juga sedang menyusun konsep *Technical Compliance* (TC) dalam rangka menjawab kecukupan pengaturan program APU PPT dengan standar FATF, untuk kemudian diserahkan kepada PPATK selaku koordinator nasional MER.



Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan I-2019, OJK menerima 10.943 layanan terkait konsumen sektor Perbankan, terdiri dari 87,02% pertanyaan; 12,39% penerimaan informasi; dan 0,58% pengaduan. OJK juga senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen antara lain melalui program Laku Pandai, Sempel, SiMUDA, dan TPAKD.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK), dimana OJK dapat meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, serta menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK.

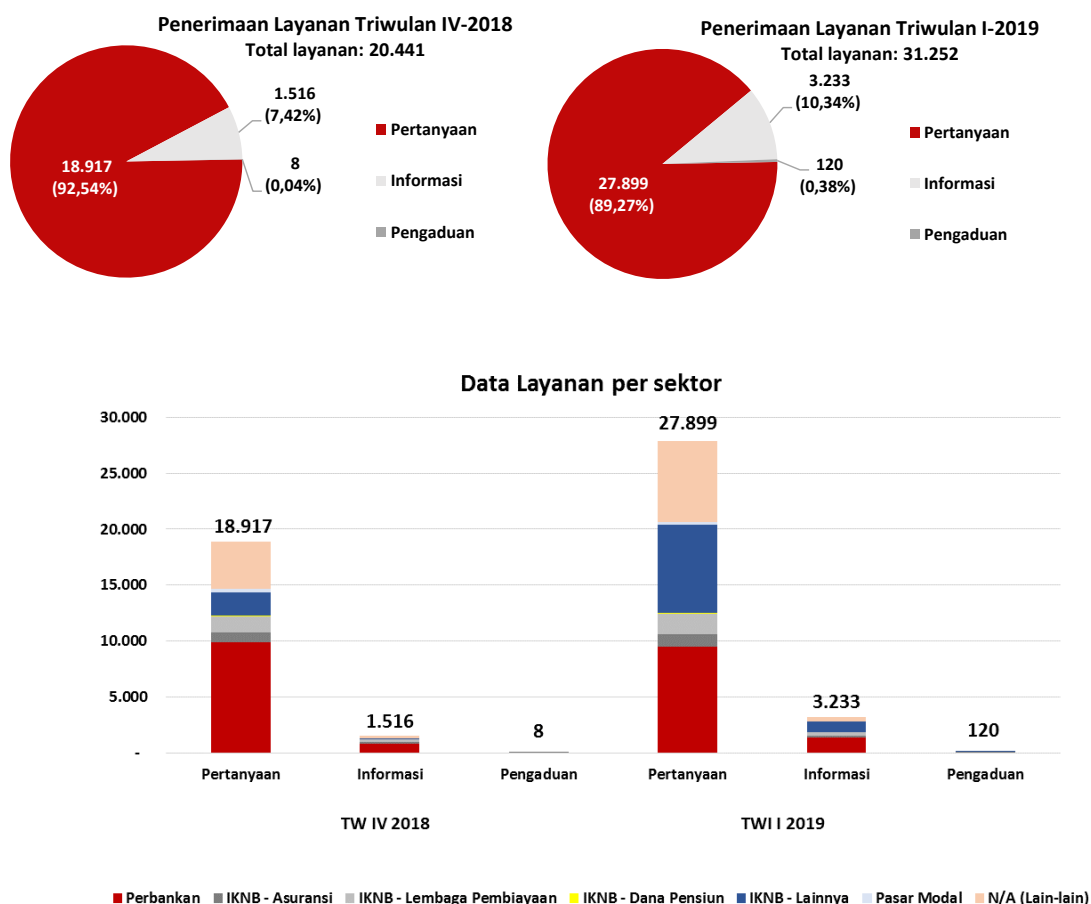
Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian PUJK). Pada triwulan I-2019, Layanan Konsumen OJK menerima 31.252 layanan yang terdiri dari 27.899 pertanyaan, 3.233 penerimaan informasi, dan 120 pengaduan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 52,89% (10.811 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 36 Total Layanan Per Sektor

Sektor	TW IV 2018	TW I 2019	qtq	Porsi
Perbankan	10.719	10.943	2,09%	35,02%
IKNB	4.938	12.369	150,49%	39,58%
IKNB - Asuransi	1.048	1.337	27,58%	4,28%
IKNB - Lembaga Pembiayaan	1.660	2.136	28,67%	6,83%
IKNB - Dana Pensiun	43	47	9,30%	0,15%
IKNB - Lainnya	2.187	8.849	304,62%	28,31%
Pasar Modal	352	288	-18,18%	0,92%
Lainnya	4.432	7.652	72,65%	24,48%
Total	20.441	31.252	52,89%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, 31.252 layanan tersebut terdiri dari 10.943 layanan (35,02%) terkait Perbankan, 12.369 layanan (39,58%) terkait IKNB, 288 layanan (0,92%) terkait

Pasar Modal, dan 7.652 layanan (24,48%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 10.943 layanan Sektor Perbankan, 87,02% (9.523 layanan) merupakan pertanyaan, 12,39% (1.356 layanan) informasi, dan 0,58% (120 layanan) pengaduan.

Pada triwulan I-2019, penerimaan layanan sektor perbankan meningkat 2,09% (224 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10.719 layanan.

Tabel 37 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	TW IV 2018	TW I 2019	qtq	Porsi
Pertanyaan	9.907	9.523	-3,88%	87,02%
Informasi	809	1.356	67,61%	12,39%
Pengaduan	3	64	2033%	0,58%
Total	10.719	10.943	2,09%	100%

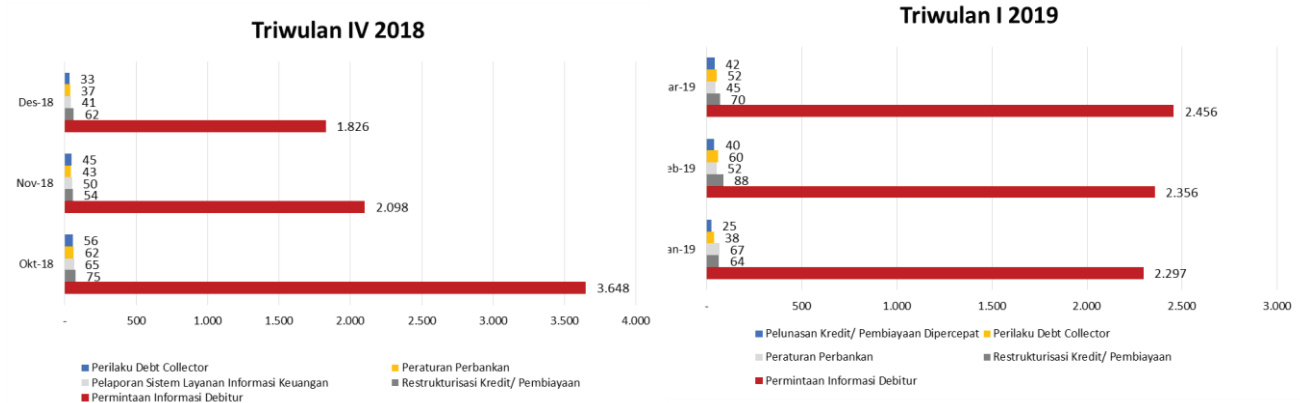
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 9.523 pertanyaan terkait sektor perbankan (87,02% dari total sebanyak 10.943 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini menurun 3,88% (384 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan I-2019 terkait permintaan informasi debitur sebesar 74,65% (7.109 layanan) dan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebesar 2,33% (222 layanan). Sebagian besar pertanyaan yang diajukan terkait permohonan informasi

debitur (IDEB) pada SLIK untuk pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara pertanyaan terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan, umumnya konsumen (debitur) menanyakan perihal permohonan keringanan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dikarenakan mengalami penurunan kondisi keuangan. Selain itu, juga terdapat permohonan keringanan denda dan bunga pada mekanisme restrukturisasi kredit.

Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan



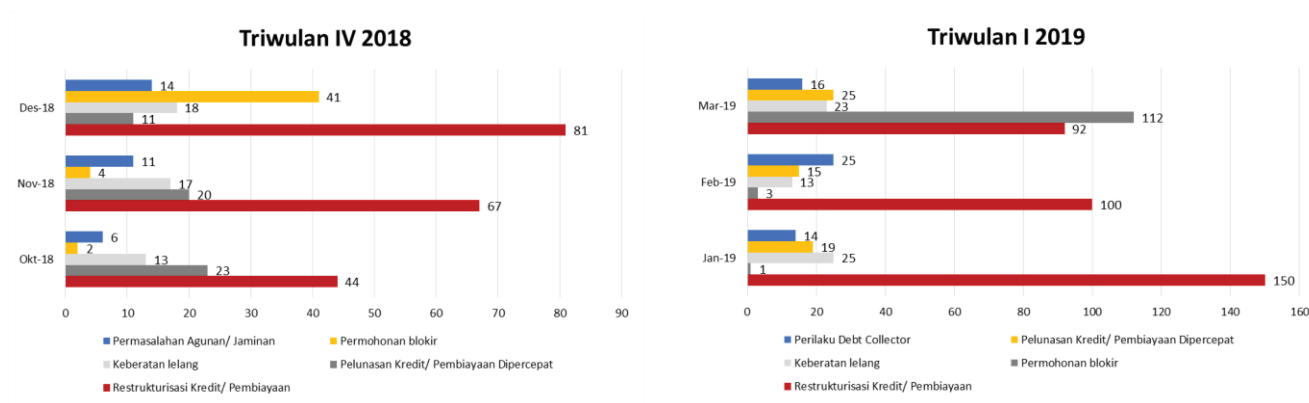
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan penerimaan informasi terkait perbankan pada periode laporan sebesar 12,39% (1.356 layanan) dari seluruh layanan yang terkait dengan sektor Perbankan. Jumlah layanan informasi meningkat sebesar 67,61% dari triwulan IV-2018. Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan sebesar 25,22% (342 Layanan) dan permohonan blokir rekening sebesar 8,55% (116 Layanan).

Substansi terbanyak yang disampaikan terkait permasalahan restrukturisasi kredit/pembiayaan adalah perihal keberatan atas denda pada mekanisme restrukturisasi kredit/pembiayaan. Sementara itu, pada jenis permasalahan permohonan blokir, substansi terbanyak yang disampaikan berasal dari Kementerian Keuangan RI yang menyampaikan permohonan untuk memblokir kekayaan wajib pajak yang memiliki hutang pajak untuk dijadikan jaminan bagi pembayaran pajak.

Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan I-2019, terdapat 64 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan terbanyak yakni pelaporan informasi debitur dan kredit lunas namun agunan atau jaminan belum dikembalikan. Layanan pengaduan meningkat sebanyak 61 pengaduan dari triwulan sebelumnya. Selain itu, terdapat 80 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan I-2019. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait

dengan sanggahan transaksi yaitu sebesar 8,75% (7 layanan) dan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yaitu sebesar 8.75% (7 layanan).

Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan I-2019, terdapat 4.124 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.190 pengaduan atau 53,10% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan perbankan tersebut, 99,68% (2.183 pengaduan) telah diselesaikan.

1.2 Data Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai informasi debitur melalui layanan SLIK di kantor OJK masing-masing wilayah pada pukul 09.00 – 15.00 waktu setempat. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan layanan Sistem Informasi Debitur (SID) yang diberikan Bank Indonesia sebelumnya adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja. Informasi pada SLIK merupakan kontribusi 1.655 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari 102 BUK, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR, 142 BPRS, 32 Lembaga Pembiayaan, 5 Perusahaan Modal Ventura, 8 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 1 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan 1 Koperasi Simpan Pinjam. Informasi tersebut yang diberikan melalui *platform* informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer.

Grafik 46 Media Penerimaan Layanan SLIK Triwulan I-2019



Sumber: OJK

Pada triwulan I-2019, sebanyak 18.266 masyarakat telah menerima layanan SLIK baik melalui Pusat Pelayanan SLIK di Kantor OJK maupun *call center*. Permintaan informasi yang dilayani antara lain mengenai data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debet, kualitas kredit, beban bunga, cicilan

pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. Disamping itu, SLIK juga dapat memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan dalam melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

2. Kegiatan Komunikasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan I-2019, OJK melaksanakan beberapa kegiatan terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu:

1) *Coffee Morning* bersama *Working Group Internal Dispute Resolution*

Dalam rangka memperkuat infrastruktur perlindungan konsumen serta sebagai sarana komunikasi terkait mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk *Working Group Internal Dispute Resolution* (WG IDR) yang beranggotakan 38 (tiga puluh delapan) PUJK yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sektor perbankan, 11 (sebelas) sektor asuransi, dan 6 (enam) sektor pembiayaan.

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan pertemuan dengan WG IDR dengan tema "*overview* layanan Konsumen 2018 dan pengenalan penegakan disiplin pelaku pasar

(*market conduct*)” dengan konsep “*coffee morning* perlindungan Konsumen”. Kegiatan *Coffee Morning* dimaksud bertujuan untuk menyampaikan *update* kegiatan strategis perlindungan konsumen selama tahun 2018 dan mendiskusikan aspek penegakan disiplin pelaku pasar serta *soft launching* pedoman iklan jasa keuangan.

- 2) Kegiatan komunikasi mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) konsumen di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada PUJK dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap LAPS dalam rangka penyelesaian-penyelesaian sengketa konsumen yang kredibel, efektif dan efisien.

Kegiatan dimaksud dilakukan bersama dengan Badan Arbitase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Dalam kegiatan tersebut diinformasikan ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang telah dilakukan OJK, memberikan pemahaman kepada perwakilan PUJK serta wakil masyarakat melalui aktifis akademis tentang pentingnya keberadaan LAPS di sektor jasa keuangan dan pengenalan beberapa LAPS yang ada di Indonesia yaitu, Badan Arbitase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelsaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI), dan

Badan Arbitase Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI).

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui masih terdapat tantangan dan hambatan di PUJK atau masyarakat yang belum mengetahui ketentuan perlindungan konsumen yang telah dikeluarkan oleh OJK, belum memahami fungsi dan peran OJK dalam melakukan perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa melalui LAPS. Sengketa konsumen dengan PUJK biasanya diawali dengan adanya laporan pengaduan akibat kerugian atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen karena tidak terpenuhinya hak dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban para pihak.

3. **Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar**

Dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar, OJK telah melaksanakan *Thematic Surveillance* (TS) terhadap sampel Bank Umum, Bank Umum Syariah, maupun Bank Pembangunan Daerah sepanjang triwulan I-2019 dengan tema Perjanjian Baku. Tujuan dari TS ini adalah untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh PUJK terutama dalam melaksanakan perjanjian dengan konsumen, mulai dari penyusunan perjanjian baku, implementasi, hingga evaluasinya.

Selanjutnya, menyikapi maraknya *platform* peminjaman *online* yang muncul belakangan ini, OJK juga melaksanakan Operasi Intelijen Pasar. Kegiatan ini mengambil sampel 15 *Financial Technology* (*fintech*) yang terdaftar dan berizin dari OJK. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

untuk menganalisis potensi kerawanan pinjaman *online*, terutama dari sisi perlindungan konsumen.

4. Pemantauan Iklan Triwulanan

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. Monitoring harian yang dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode laporan, OJK mencatat terdapat 44 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 43 iklan dari sektor perbankan dan 1 iklan dari sektor IKNB. Berdasarkan hasil analisis, dari 44 iklan di media cetak, ditemukan 28 iklan (64%) masih melanggar ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Kategori yang paling banyak dilanggar selama periode laporan berturut-turut adalah Lain-Lain (21), Tidak Jelas (16), Menyesatkan (4), dan Tidak Akurat (3). Termasuk dalam kategori Lain-Lain adalah tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" dan/atau pernyataan yang dicantumkan tidak terbaca (ditulis dengan ukuran yang terlalu kecil, dicantumkan tidak secara horisontal, atau warna tidak kontras dengan latar belakang). Termasuk dalam kategori Tidak Jelas adalah iklan yang informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat

dan ketentuannya tidak lengkap. Termasuk dalam kategori Menyesatkan adalah iklan yang materinya berisiko menimbulkan perbedaan persepsi dengan masyarakat. Termasuk dalam kategori Tidak Akurat adalah iklan yang mencantumkan klaim dan/atau menggunakan data, namun tidak mencantumkan sumber data yang kredibel.

Dapat dilihat bahwa kategori Lain-Lain dan Tidak Jelas menjadi kategori yang selalu dilanggar berdasarkan tren pelanggaran sepanjang periode pelaporan. Padahal, pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" merupakan salah satu hal yang bisa dilihat oleh masyarakat untuk menjamin bahwa PUJK merupakan lembaga keuangan resmi yang terdaftar dan diawasi OJK. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk dan/atau layanan jasa keuangan di tengah maraknya entitas ilegal yang menjalankan praktik menyerupai lembaga keuangan. Terkait dengan hal ini, OJK telah mengirimkan Surat Pembinaan kepada PUJK yang diketahui melakukan pelanggaran iklan.

5. Peluncuran Pedoman Iklan Jasa Keuangan

Melihat masih banyaknya pelanggaran iklan yang dilakukan oleh PUJK, serta mengingat urgensi pengaturan iklan sebagai lini pertama pengenalan masyarakat kepada produk dan/atau layanan lembaga jasa keuangan, OJK menyusun Pedoman Iklan Jasa Keuangan sebagai *guideline* bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini merupakan penyelarasan dari UU Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, serta Etika Pariwara Indonesia.

Dalam pedoman iklan tersebut, objek pemantauan iklan diperluas dari sebelumnya hanya PUJK yang tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menjadi seluruh Lembaga Jasa Keuangan. Penyusunan Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini melibatkan asosiasi LJK selaku *stakeholder*. Pedoman Iklan Jasa Keuangan pertama kali diluncurkan dalam acara *Coffee Morning* pada Maret 2019. Pedoman Iklan saat ini sudah dapat diunduh di *minisite* Sikapiuangmu dan situs resmi OJK.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Inklusi keuangan di Indonesia relatif meningkat salah satunya tercermin dari pencapaian Laku Pandai pada periode berjalan yang mengalami peningkatan jumlah agen, nasabah, serta nominal tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA). Pada triwulan I-2019, nominal BSA tumbuh 59,87% (qtq) menjadi Rp2,51 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan penyaluran dana bansos pada periode yang sama ke rekening nasabah BSA yang

menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos.

Tabel 38 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2019

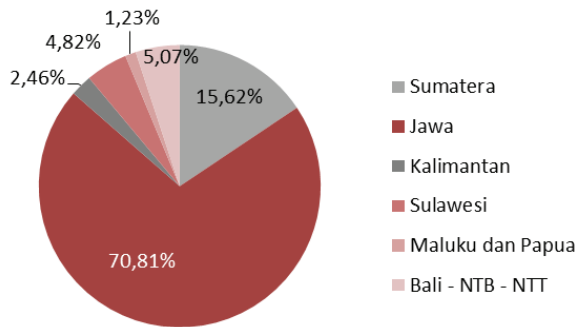
Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.043.856	29.278
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
23.340.281	Rp2,51 Triliun

Sumber: OJK

Sebagian besar nasabah BSA masih terkonsentrasi di pulau Jawa (70,81%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diikuti oleh Sumatera sebesar 15,62% dan sisanya sebesar 13,57% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran agen Laku Pandai yang sebagian besar berada di pulau Jawa (64,86%) dan Sumatera (19,64%), sementara sisanya (15,49%) tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

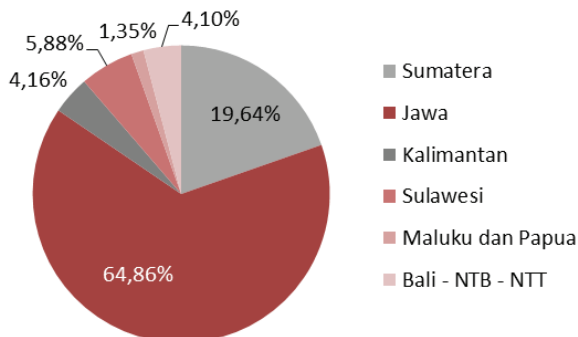
Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.

Grafik 47 Wilayah Penyebaran Nasabah Laku Pandai



Sumber: OJK, Maret 2019

Grafik 48 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai



Sumber: OJK, Maret 2019

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Sampai dengan triwulan I-2019, program ini telah diikuti oleh 314 bank (57 Bank Umum dan 257 BPR/BPRS) dengan capaian pembukaan rekening sebanyak 17.230.208 rekening dengan nominal Rp6,04 triliun.

Selama triwulan I-2019, dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan budaya menabung bagi pelajar yaitu *SimPel goes to School* bagi pelajar di wilayah Aceh. Acara tersebut dilaksanakan di SMPN 19 Percontohan Banda Aceh bekerjasama dengan Bank Aceh Syariah. Selain itu, juga telah dilakukan

sosialisasi kepada BPR/BPRS yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

SiMUDA adalah program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Skema produk tersebut antara lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu.

Sampai dengan triwulan I-2019, program SiMUDA telah diikuti oleh 8 bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Mandiri; dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Adapun perkembangan program SiMuda pada triwulan I-2019 yaitu sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 46 rekening dengan nominal Rp18.148.015
- SiMuda RumahKu: 10.385 rekening dengan nominal Rp8.745.590.080
- SiMuda EmasKu: 11 rekening dengan nominal Rp4.563.888.

Dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap program SiMUDA, telah dilaksanakan sosialisasi program SiMUDA pada kegiatan OJK *Goes to Campus* kepada mahasiswa Politeknik Negeri Ambon bersama bank peserta SiMUDA dengan diikuti oleh 1.028 mahasiswa. Selain itu, telah dilaksanakan juga kegiatan sosialisasi SiMUDA di Universitas Muhammadiyah Makassar yang dihadiri oleh 1.200 mahasiswa dengan melibatkan bank peserta

SiMUDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSM. Adapun total rekening yang dibuka pada saat kegiatan adalah 157 rekening.

4. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business*) lainnya. Sampai dengan triwulan I-2019, terdapat 87 TPAKD yang telah dikukuhkan dengan rincian 32 TPAKD Provinsi dan 55 TPAKD Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota TPAKD, telah dilaksanakan 2 kali *coaching clinic* TPAKD yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Daerah Istimewa Aceh. Materi yang disampaikan antara lain meliputi materi terkait inklusi keuangan; perkembangan program kerja TPAKD tahun 2018; evaluasi program kerja TPAKD Provinsi NTT tahun 2018; serta arah penguatan program kerja TPAKD tahun 2019. Adapun program kerja TPAKD Provinsi NTT yaitu:

- a. Peningkatan produksi perikanan melalui program Asuransi Nelayan (Asnel);
- b. Peningkatan kapasitas nelayan melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);

- c. Peningkatan Akses Keuangan melalui program Laku Pandai dan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).

Selama triwulan I-2019, telah dikukuhkan 4 TPAKD, yaitu TPAKD Kabupaten Wonogiri, TPAKD Kota Magelang, TPAKD Kabupaten Purbalingga, dan TPAKD Kota Makassar. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan secara simbolis program akses pembiayaan kepada perwakilan pelaku UMKM.

5. Edukasi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap produk dan sektor jasa keuangan, pada triwulan I-2019 telah dilakukan edukasi keuangan melalui beberapa kegiatan yaitu Pagelaran Wayang, *OJK Goes to Campus, Financial Expo, Visit OJK, OJK Goes to School*, serta edukasi keuangan bagi karyawan dan profesional. Materi yang disampaikan antara lain meliputi pengenalan OJK dan waspada investasi, perencanaan keuangan, budaya menabung dan berinvestasi, serta pengenalan produk Lembaga Jasa Keuangan.

6. Training of Trainers (ToT) kepada Guru SMP dan SMA

Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilaksanakan oleh OJK pada 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia baru sebesar 29,6%, sedangkan indeks inklusi masyarakat Indonesia sebesar 67,8%. Tingkat literasi yang lebih rendah dibanding tingkat inklusi atau penggunaan produknya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang cukup dalam menggunakan produk dan layanan di lembaga keuangan formal. Sebagai upaya

OJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan serta produk dan layanan keuangan dalam rangka mencapai target literasi keuangan 35% dan inklusi keuangan 75%, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 dan Perpres No.82 tahun 2016, maka dilaksanakan *Training of Trainers* (ToT) bagi Guru dan Dosen. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut antara lain untuk memberikan pemahaman tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan serta memperkenalkan materi buku seri literasi keuangan kepada guru/dosen tingkat perguruan tinggi agar selanjutnya para guru/dosen dimaksud diharapkan dapat mengajarkan materi literasi keuangan

kepada siswa/mahasiswa serta berbagi ilmu kepada guru/dosen lainnya sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang lebih luas. Sepanjang triwulan I-2019, OJK telah melaksanakan 2 kali ToT bagi Guru SMP dan SMA yang dilaksanakan di kota Jambi dan Palembang.

7. *Workshop SiPEDULI*

Dalam rangka mendorong partisipasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaksanakan kegiatan literasi keuangan, pada triwulan I-2019 telah dilaksanakan 5 kegiatan *workshop* yang diikuti oleh PUJK di wilayah Cirebon, Madiun, Banda Aceh, Palangkaraya dan Surabaya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio PDN Valuta Utama	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto Valuta Utama}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan I-2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 1/POJK.03/2019	Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum	29 Januari 2019	Diperlukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai penerapan fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam PBI No.1/6/PBI/1999 dalam rangka mengakomodir perkembangan praktik tata kelola dan <i>best practice</i> fungsi audit intern yang diterbitkan oleh <i>The Basel Committee on Banking Supervision</i> serta standar praktik profesional audit internal yang diterbitkan oleh <i>The Institute of Internal Auditors</i> .	<p>a. Kewajiban Bank untuk memiliki fungsi audit intern serta struktur, wewenang, dan tugas pokok SKAI.</p> <p>b. Etika profesional SKAI meliputi independensi, objektivitas, kompetensi, dan integritas.</p> <p>c. Penyusunan piagam audit intern, rencana audit tahunan, dan cakupan aktivitas audit intern. Bank harus melakukan penyesuaian atas piagam audit intern yang dimiliki paling lambat tanggal 1 Juni 2019.</p> <p>d. Tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dalam pelaksanaan fungsi audit intern.</p> <p>e. Hubungan dan kerja sama antara SKAI dengan unit kerja pengendalian lainnya dan auditor ekstern.</p> <p>f. Kewajiban SKAI untuk melakukan komunikasi secara rutin dengan OJK dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.</p> <p>g. Fungsi SKAI dalam kelompok usaha baik untuk bank sebagai perusahaan induk maupun bank sebagai perusahaan anak.</p> <p>h. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern untuk keahlian</p>	POJK Nomor 1/POJK.03/2019

No. POJK/ SEOJK	No Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
2	Prinsip Kehati- hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum	27 Maret 2019	Diperlukan penyempurnaan atas PBI 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati- hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum agar sesuai dengan standar Basel 3	<p>husus dan bersifat sementara.</p> <p>i. Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan pengungkapan atau pemberhentian kepala SKAI; 2) laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; 3) laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya; dan 4) laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. <p>j. POJK berlaku bagi bank umum konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p>	POJK Nomor 11/POJK. 03/2019
				<p>a. Dalam sekuritisasi aset, Bank dapat melakukan aktivitas sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kreditur awal (<i>Originator</i>); 2) Penyedia kredit pendukung (<i>Credit Enhancement</i>); 3) Penyedia fasilitas likuiditas (<i>Liquidity Facility</i>); 4) Penyedia jasa (<i>Servicer</i>); 5) Investor; dan/atau 6) Bank kustodian 	

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>b. Perubahan ketentuan Bank yang dapat melakukan kegiatan sekuritisasi aset yaitu Bank BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 dapat melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 5). Sementara Bank yang dapat melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) merupakan Bank BUKU 3 dan BUKU 4.</p> <p>c. Pengenaan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk eksposur sekuritisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Basel 2, sepanjang persyaratan <i>due diligence/disclosure</i> atas eksposur tersebut terpenuhi yaitu antara 15% - 1.250%.</p> <p>d. Perubahan penyampaian laporan kepada OJK yaitu disampaikan secara daring (<i>online</i>) melalui sistem pelaporan OJK.</p>	
3	SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat	21 Januari 2019	Untuk memberikan standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR sebagai acuan minimum dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.	<p>a. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris; 2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; 3) Kecukupan proses dan sistem; dan 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. <p>b. Penerapan Manajemen Risiko, meliputi</p>	SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019

No. No. POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				<p>penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategik, dengan tetap mengacu kepada jenis risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.</p>	
				<p>C. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan Sistem Pengendalian Risiko BPR.</p>	

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK>10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD>50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
<i>Bancassurance</i>	Aktivitas kerjasama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. (SEOJK No.32/SEOJK.05/2016)
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.

Istilah	Keterangan
<i>Cash Ratio (CR)</i>	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i>	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
E	
<i>Electronic Data Capture (EDC)</i>	Mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara <i>realtime</i> .
<i>E-licensing</i>	Sistem perizinan secara <i>online</i> yang memberikan layanan informasi status terkini atas pengajuan perizinan yang telah disampaikan serta informasi ketentuan proses dan persyaratan dokumen perizinan perbankan.
F	

Istilah	Keterangan
<i>Fit and Proper Test/ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Existing)</i>	Penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif untuk melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi.
<i>Fit and Proper Test/ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP)	Forum yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan SKB antara BI dan OJK untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang terkait dengan pertukaran informasi antara kedua lembaga dan pelaporannya, mencakup perbankan konvensional dan syariah.
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya.
H	
<i>Horizontal Group</i>	Penggolongan entitas/LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama.
I	
<i>Internal Dispute Resolution (IDR)</i> Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Mekanisme penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

Istilah	Keterangan
	keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Integrated Supervisory Plan (ISP)</i>	Suatu dokumen tertulis yang berisikan fokus dan strategi pengawasan yang akan dilakukan oleh pengawas terintegrasi dalam satu kurun waktu tertentu sesuai dengan siklus pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. (SEDK No. 3/SEDK.03/2015)
<i>Integrated Risk Rating (IRR)</i>	Metodologi penilaian terhadap konglomerasi keuangan berdasarkan analisis atas informasi yang diperoleh dari pengawas individu dan informasi lainnya dengan memperhatikan secara seksama risiko secara keseluruhan (<i>group wide</i>) yang belum dideteksi dalam proses penilaian LJK secara individual. (SEDK No. 2/SEDK.03/2015)
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang mempengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
<i>Know Your Financial Conglomerates (KYFC)</i>	Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dari Konglomerasi Keuangan untuk menyediakan informasi dan bahan analisis bagi Pengawas Terintegrasi dalam melakukan penilaian profil risiko dan tingkat kondisi Konglomerasi Keuangan.
Konglomerasi Keuangan	Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Istilah	Keterangan
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA) (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
<i>Mixed Group</i>	<i>Mixed Group</i> yaitu apabila dalam satu Konglomerasi Keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat <i>vertical group</i> dan <i>horizontal group</i> .
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan <i>Jarah</i>	Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pemiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik	Pemiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemiayaan Istishna'	Pemiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemiayaan Mudharabah	Pemiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemiayaan Murabahah	Pemiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemiayaan Musarakah	Pemiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemiayaan Qardh	Pemiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pengawasan Bank berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)	Pengawasan Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. (PDK OJK Nomor 1/PDK.03/2018 tentang Pengawasan Bank berdasarkan Risiko)
Pengawasan Langsung (on-site supervision)	Pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi/kantor bank yang diawasi. Pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
Pengawasan Tidak Langsung (off-	Pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil

Istilah	Keterangan
<i>site supervision</i>)	pemeriksaan dan informasi lainnya.
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)	Pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. (PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional)
Posisi Devisa Netto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset (ROA)</i>	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.

Istilah	Keterangan
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Akseptasi	Tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Training of Trainer (TOT)</i>	Pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain.
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
V	
<i>Vertical Group</i>	Penggolongan entitas/LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu apabila terdapat hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

